



**ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN
(KUD) DI KABUPATEN SITUBONDO: STUDI MODAL SOSIAL
DAN DINAMIKA PENDAPATAN NELAYAN**

TESIS

**Oleh:
WAHYU KURNIASIH
NIM. 130820201023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN
(KUD) DI KABUPATEN SITUBONDO: STUDI MODAL SOSIAL
DAN DINAMIKA PENDAPATAN NELAYAN**

**ECONOMIC ANALYSIS OF INSTITUTIONAL FISHERMAN
COOPERATION (KUD) IN SITUBONDO : A STUDY OF
SOCIAL CAPITAL AND FISHERMAN
REVENUE DYNAMIC**

TESIS

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2)
dan mencapai gelar Magister**

Oleh:
**WAHYU KURNIASIH
NIM. 130820201023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan hidayah-Nya serta limpahan kasih sayang-Nya, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa keberkahan dan rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Saya ucapkan Alhamdulillah, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan selanjutnya akan saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku dan mertuaku
2. Suamiku, serta kedua jagoan kecilku
3. Kakak-kakakku dan buah hatinya
4. Almamaterku, UB dan Unej
5. Guru-guruku sejak TK hingga pascasarjana

MOTTO

“Infiruu khifaafaw-watsiqoolaw-wajaahiduu bi amwaalikum wa anfusikum fii
sabiilillaah..”

“Berangkatlah, baik kamu merasa ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta
dan jiwamu..” (QS. At-Taubah: 41)

Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan,
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia
marah.

(Nabi Muhammad Saw)

**Dakwah Maksud Tujuan Hidup: Hidup dalam Dakwah, Dakwah sampai Mati,
Mati dalam Dakwah (laa illa ha 'ilallah)"**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU KURNIASIH

NIM : 130820201023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN (KUD) DI KABUPATEN SITUBONDO: STUDI MODAL SOSIAL DAN DINAMIKA PENDAPATAN NELAYAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2015

Yang menyatakan,

WAHYU KURNIASIH
NIM 130820201023

TESIS

**ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN (KUD)
DI KABUPATEN SITUBONDO: STUDI MODAL SOSIAL DAN
DINAMIKA PENDAPATAN NELAYAN**

**ECONOMIC ANALYSIS OF INSTITUTIONAL FISHERMAN
COOPERATION (KUD) IN SITUBONDO :A STUDY OF
SOCIAL CAPITAL AND FISHERMAN
REVENUE DYNAMIC**

Oleh:

**WAHYU KURNIASIH
NIM. 130820201023**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sarwedi, MM
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Zainuri, M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Ekonomi Kelembagaan Koperasi Nelayan (KUD) Di Kabupaten Situbondo: Studi Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan Nelayan
Nama : Wahyu Kurniasih
NIM : 130820201023
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah
Disetujui untuk diuji : 21 Desember 2015

Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Prof. Dr. Sarwedi, MM
NIP. 19531015 198303 1 001

Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Ilmu Ekonomi
Ketua Program Studi

Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si
NIP. 1971061020011122002

PENGESAHAN

JUDUL TESIS

**ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN (KUD)
DI KABUPATEN SITUBONDO: STUDI MODAL SOSIAL DAN
DINAMIKA PENDAPATAN NELAYAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahyu Kurniasih

NIM : 130820201023

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

21 Desember 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Lilis Yuliati S.E., M.Si
NIP. 19690718 199512 2 001
2. Sekretaris : Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si
NIP. 1971061020011122002
3. Anggota I : Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE, M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001
4. Anggota II : Prof. Dr. Sarwedi, MM
NIP. 19531015 198303 1 001
5. Anggota III : Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Analisis Ekonomi Kelembagaan Koperasi Nelayan (KUD) di Kabupaten Situbondo: Studi Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan Nelayan

WAHYU KURNIASIH

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

TPI/KUD Mina tersebut merupakan unsur yang penting dan memiliki peran yang strategis bagi nelayan. Lembaga ekonomi tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup yang dihadapi oleh nelayan. Keberadaan TPI/KUD diharapkan mampu menjembatani ketimpangan hubungan sosial yang terjadi antara nelayan atau buruh nelayan dengan pangambek atau juragan. KUD sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat nelayan diharapkan mampu memberikan akses permodalan, bimbingan teknologi penangkapan, penjamin harga yang berpihak pada kepentingan nelayan terutama kepentingan nelayan anggotanya. Namun pada kenyataannya keberadaan TPI masih bersifat eksploratif dan KUD Mina sebagai sebuah lembaga perekonomian rakyat cenderung bersifat monopolistik, hampir semua koperasi nelayan di Kabupaten Situbondo tidak lebih hanya sebagai lembaga penarik retribusi sehingga keberadaannya belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat nelayan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola kelembagaan KUD di Kabupaten Situbondo, memaparkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan KUD di Kabupaten Situbondo, merumuskan desain kelembagaan KUD untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan data primer melalui metode wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Pemilihan informan menggunakan teknik *snowballing sampling* pada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pola kelembagaan KUD di Kabupaten Situbondo sangat ditentukan oleh modal sosial yang terbangun antara nelayan dan pengelola TPI/KUD. Modal sosial yang berperan antara lain kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*). Krisis kepercayaan yang terjadi dalam hubungan keduanya menyebabkan nelayan mencari alternatif lain seperti pengambek, *blantik* atau KUD tandingan yang dianggap lebih mampu mengakomodir kepentingan nelayan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KUD antara lain SDM pengurus KUD yang belum baik, program KUD yang tidak terarah, tidak adanya kepercayaan nelayan terhadap KUD dan KUD belum mampu menjadi tumpuan hidup nelayan.

Kata Kunci : Ekonomi kelembagaan, KUD Mina, Nelayan, Modal sosial, dan dinamika pendapatan

Economy Analysis of Institutional Fisherman Cooperation (KUD) in Situbondo: A Study of Social Capital and Fisherman Revenue Dynamic.

Wahyu Kurniasih

Master of Economics, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

The TPI/KUD Mina is eventful element and having strategic role for fisherman. That economy institution is really helpful to solve lives problems faced by fishermen. The availability of TPI/KUD is expected to be able to bridge one-sidedness of social relationship occurred among fishermen or fisherman workers with pengambek or bosses. KUD as alternative institution for fishermen is expected to be able to give capital access, technology guidance for catching, price guarantor siding with fishermen especially his fishermen member. However, in fact the existence of TPI is still explorative and KUD Mina as an institutional economy for people tends to be monopolistic, almost all of fishermen cooperation in Situbondo is nothing more than a levy puller institution so that the existence has not been capable to overcome the existing problems for fisherman. The objective of the research is to analyze institutional KUD pattern in Situbondo, to describe obstacles encountered in developing KUD in Situbondo, to formulate institutional KUD design to escalate fishermen revenue. This research is qualitative research by applying primary data collection through interview method and focus group discussion (FGB). Informant selection uses snowballing sampling method toward informant decided in advance. The research results show that institutional KUD pattern in Situbondo is vitally determined by social capital constructed between fishermen and TPI/KUD managers. Social capital contributed is such as trust and networking. Trust crisis happened in their relation causes fishermen to look for another alternative such as pengambe', blantik (broker) or KUD counter considered more capable to accommodate fishermen interests. Constraints encountered in the development KUD are the human resources of KUD management is not good yet, undirected KUD programs, lack of trust of fishermen toward KUD, and KUD cannot be reliable institution for fishermen life to rely on.

Key words: Institutional economy, KUD Mina, Fishermen, Social Capital, and Revenue Dynamic

RINGKASAN

Analisis Ekonomi Kelembagaan Koperasi Nelayan (KUD) di Kabupaten Situbondo: Studi Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan Nelayan, Wahyu Kurniasih, 130820201023;2015:101 halaman, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Peningkatan kesejahteraan nelayan dapat diusahakan melalui berbagai cara. Salah satunya, dengan melakukan optimalisasi peran TPI/KUD sebagai lembaga yang menampung dan mengelola hasil tangkapan ikan nelayan. Secara tegas Kusnadi, 2003 menyatakan bahwa TPI/KUD Mina tersebut merupakan unsur yang penting dan memiliki peran yang strategis bagi nelayan. Lembaga ekonomi tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup yang dihadapi oleh nelayan. Keberadaan TPI/KUD diharapkan mampu menjembatani ketimpangan hubungan sosial yang terjadi antara nelayan atau buruh nelayan dengan pangambek atau juragan. Ketimpangan hubungan tersebut berupa eksploitasi dari pihak juragan atau pangambek terhadap nelayan melalui permainan harga ikan tangkapan nelayan. Hal ini tentu saja sangat merugikan nelayan. Hubungan sosial tersebut merupakan sebuah proses interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi yang terjadi secara terus menerus dan membentuk sebuah norma atau aturan-aturan tertentu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan sosial tersebut. Hal ini menimbulkan lahirnya aturan main atau kelembagaan antara nelayan dengan TPI/KUD. Kelembagaan yang terjadi pada masyarakat pesisir merupakan interaksi antara pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu seperti kesejahteraan.

Salah satu kelembagaan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah koperasi. Agar dapat mengambil peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan TPI sebagai kelembagaan lokal di wilayah pesisir harus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi bisnis yang berdaya saing. Koperasi nelayan sebagai bagian dari sistem kelembagaan ekonomi lokal masyarakat pesisir, diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap ketidakadilan nelayan. KUD

sebagai lembaga alternative bagi masyarakat nelayan diharapkan mampu memberikan akses permodalan, bimbingan teknologi penangkapan, penjamin harga yang berpihak pada kepentingan nelayan terutama kepentingan nelayan anggotanya. Namun pada kenyataannya keberadaan TPI masih bersifat eksploratif dan KUD Mina sebagai sebuah lembaga perekonomian rakyat cenderung bersifat monopolistik, hampir semua koperasi nelayan di Kabupaten Situbondo tidak lebih hanya sebagai lembaga penarik retribusi sehingga keberadaannya belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat nelayan.

Belum optimalnya peran KUD Mina dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Salah satu penyebabnya adalah kepengurusan KUD yang masih carut marut dan belum bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Keberadaan KUD hanya sebagai lembaga pengelola retribusi TPI yang ditarik dai nelayan yang menimbang pada TPI tersebut. Dilain sisi, nelayan tidak merasakan manfaat dari penarikan retribusi tersebut. Hal ini menyebabkan nelayan beralih ke tempat lain untuk menimbang hasil tangkapan ikannya, seperti ke juragan darat. Pada tataran ini, nelayan menjadi semakin terikat kepada juragan darat, tidak hanya sebagai tempat menjual hasil tangkapannya namun juragan darat juga kerap kali menjadi tempat nelayan bersandar ketika kondisi keungan mereka mengalami masa suram.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memotret pola kelembagaan pada pengelolaan TPI dan KUD sebagai lembaga yang paling dekat dengan nelayan. Penelitian dilakukan di dua TPI yang pengelolaannya dilakukan oleh KUD Mina, yang terdapat di dua kecamatan di Kabupaten Situbondo, yaitu di Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Jangkar. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*), dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik pengambilan data secara kualitatif pada informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowballing sampling* yaitu teknik pengambilan data pada informan kunci (*key informan*) yang dipilih secara sengaja, kemudian dilanjutkan ke informan berikutnya berdasarkan informasi yang diberikan dari informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu informan yang dianggap memiliki

pengetahuan yang cukup tentang keberadaan serta kepengurusan KUD dan TPI di wilayahnya. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Kemudian pencarian informasi akan dilanjutkan ke informan berikutnya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan sebelumnya sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan tambahan terdiri dari nelayan, pengurus KUD tandingan serta pangambeg/bakul ikan. Total informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang informan.

Data-data yang dikumpulkan terkait modal sosial yang mempengaruhi pengelolaan TPI/KUD serta implikasinya terhadap dinamika pendapatan nelayan. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dan informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan pola kelembagaan KUD Mina di bentuk oleh modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan norma (*norm*). Kelembagaan KUD meliputi aturan main dalam pengelolaan TPI, pemungutan retribusi beserta pengelolaan retribusinya, sistem kepengurusan KUD dan TPI serta hubungan antara nelayan dan KUD. Beberapa faktor kendala dalam pengembangan KUD Mina dapat dianalisa dari faktor lingkungan eksternal dan internal. Faktor kendala tersebut antara lain: *pertama* Faktor Internal, yaitu: SDM Pengurus yang rendah, tidak adanya program kerja KUD, pemilihan ketua dan pengurus tidak sesuai AD/ART, keanggotaan KUD tidak jelas dan kepercayaan nelayan menurun. *Kedua* Faktor Eksternal, yaitu: tidak ada sanksi bagi penimbang diluar TPI, keberadaan KUD tandingan, pengambe' dan *blantik*, pengawasan dan pembinaan yang kurang dari instansi terkait.

Berdasarkan hasil analisa faktor penghambat dalam pengembangan KUD Mina serta hasil temuan empiris tentang pola kelembagaan KUD maka dapat dirumuskan disain kelembagaan KUD Mina sebagai berikut: penguatan modal sosial, bermitra dengan pengambe', KUD tandingan dan *blantik*, reformasi kepengurusan KUD dan TPI, transparansi pengelolaan retribusi TPI, penyusunan program kerja KUD, meningkatkan partisipasi nelayan anggota dalam kepengurusan KUD, dan memperluas jaringan kerjasama dengan pihak luar.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “Analisis Ekonomi Kelembagaan Koperasi Nelayan (KUD) di Kabupaten Situbondo: Studi Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan”. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Saya menyadari tesis ini merupakan karya kecil yang Saya harapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang membutuhkannya. Dalam pelaksanaan penelitian hingga proses penulisan tesis ini, penulis telah mendapat banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Adenan, MM selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Adhitya Wardhono, SE, M.Sc, Ph. D selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), atas motivasi, kesabaran dan ketulusan dalam mencurahkan waktu, perhatian dan pikiran kepada penulis. Sungguh, Bapak adalah seorang pendidik yang luar biasa, dengan intelektualitas dan perjuangan hidupnya yang telah menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang dan berkreasi dalam hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi anak bimbing Bapak. Terima kasih Bapak telah mewarnai tesis ini dengan intelektualitas dan jiwa seni Bapak sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi dan arahan agar penulis mampu menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Jember.

4. Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si selaku Ketua tim penguji, Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE, M.Si dan Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Dosen Penguji atas kesabaran, saran dan masukannya kepada penulis untuk perbaikan tesis ini sehingga tesis ini dapat dikemas dengan baik.
5. Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan serta seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember atas bekal ilmu dan kelancaran studi yang diberikan kepada penulis.
6. Orang tuaku tercinta serta keluarga besar di Situbondo yang selalu memberi motivasi dan ketulusan doa bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Suamiku, belahan jiwaku atas kesabaran dan cintanya yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih ya honey..
8. Anak-anakku tercinta, Ranianisa Mazaya Ravahardjono, Fatimah Pramidhita Luhtitisari dan Muhammad Ibrahim Abdul Fattah (alm), permata hati Bunda..
9. Rekan sejawat Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2013, kelas Situbondo, atas segala kebersamaan dan kekeluargaan yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi. Proses perkuliahan yang akan jadi memory indah dalam hidup penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberikan balasan terbaik-Nya atas semua ketulusan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini bisa menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi semua yang membacanya.

Jember, Juni 2015

Penulis

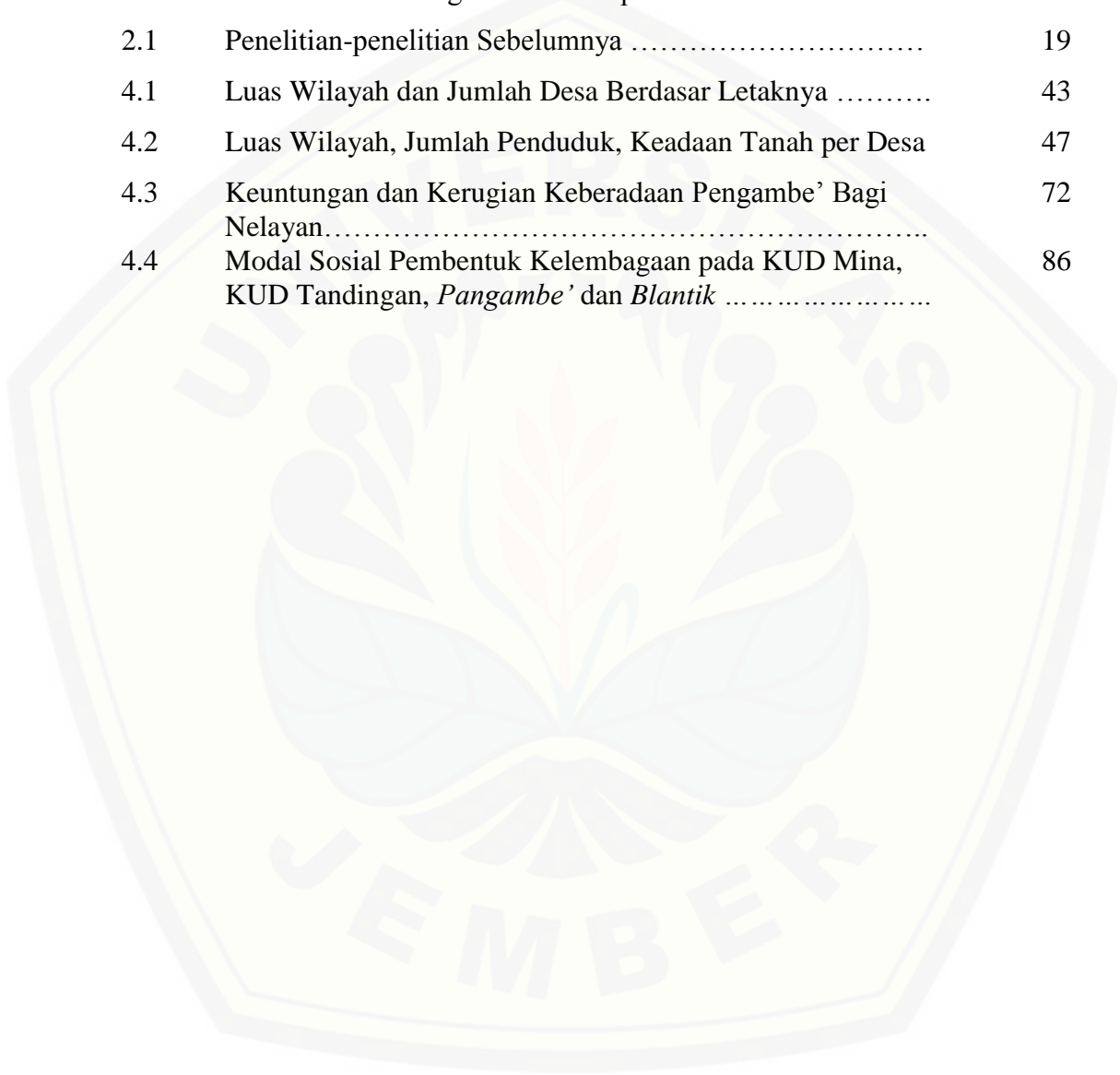
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
HALAMAN MOTTO.....	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
HALAMAN PEMBIMBINGAN	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RINGKASAN	
<i>SUMMARY</i>	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN.....	
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan	8
2.1.2 Teori Pendapatan	11
2.1.3 Teori Modal Sosial	12

2.1.4 Koperasi	14
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	16
2.3 Kerangka Konseptual	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.4 Pemilihan Informan	36
3.5 Disain Penelitian	37
3.6 Metode Analisa Data	37
3.7 Definisi Penelitian	40
3.8 Batasan Penelitian	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Perekonomian Kabupaten Situbondo	42
4.1.1 Deskripsi Sosial Ekonomi Kecamatan Banyuputih	44
4.1.2 Deskripsi Sosial Ekonomi Kecamatan Jangkar	47
4.2 Peran Modal Sosial Terkait Pola Kelembagaan KUD Mina dalam Pengelolaan TPI	50
4.2.1 Kelembagaan KUD Mina Sebagai Lembaga Sosial dan Ekonomi	53
4.2.2 Hubungan Kerja Antara Nelayan dan Pengambeg	64
4.3 Kendala-kendala dalam Pengembangan KUD Mina di Kabupaten Situbondo	89
4.3.1 Faktor-faktor Internal yang Menghambat Perkembangan KUD Mina	89
4.3.2 Faktor-faktor Eksternal yang Menghambat Perkembangan KUD Mina	91
4.4 Temuan Empiris dan Disain Kelembagaan KUD Mina dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan	93
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Nama TPi dan Pengelola di Kabupaten Situbondo	5
2.1 Penelitian-penelitian Sebelumnya	19
4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Berdasar Letaknya	43
4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Keadaan Tanah per Desa	47
4.3 Keuntungan dan Kerugian Keberadaan Pengambe' Bagi Nelayan.....	72
4.4 Modal Sosial Pembentuk Kelembagaan pada KUD Mina, KUD Tandingan, <i>Pangambe'</i> dan <i>Blantik</i>	86

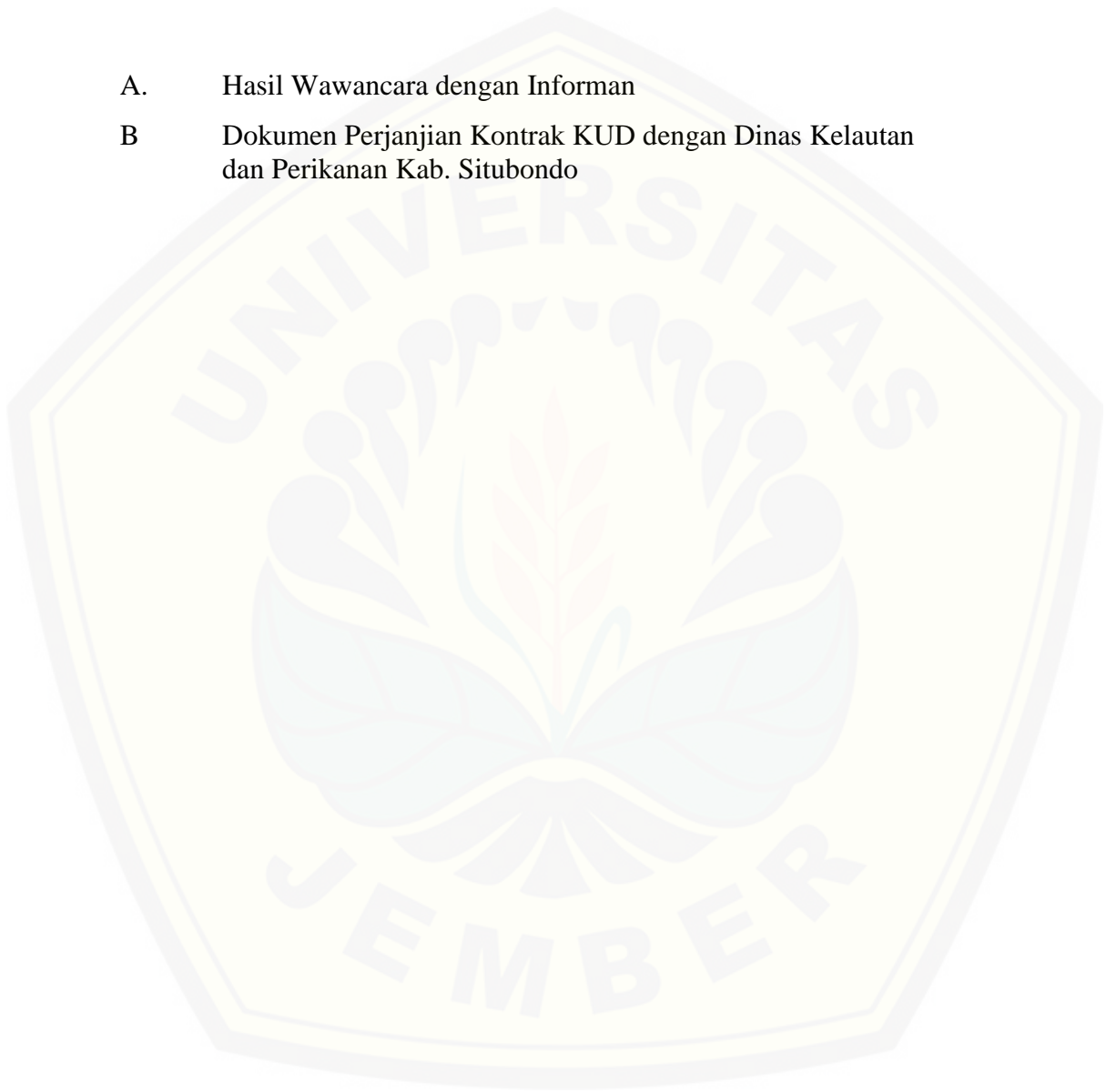


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Situbondo Tahun 2014	4
1.2 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Situbondo Tahun 2014	4
2.1 Kerangka Konseptual	33
3.1 Langkah-langkah Penentuan Informan	36
3.2 Disain Penelitian	37
3.3 Komponen-komponen Analisis Data, Metode Interaktif	39
4.1 Produksi Subsektor Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2010 s/d 2013	44
4.2 Prosentase Penduduk Kecamatan Banyuputih Menurut Mata Pencaharian	45
4.3 Potensi Subsektor Perikanan di Kecamatan Banyuputih	46
4.4 Produksi Perikanan Tangkap Kecamatan Banyuputih Tahun 2014	46
4.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Jangkar Menurut Mata Pencaharian	48
4.6 Potensi Subsektor Perikanan di Kecamatan Jangkar	49
4.7 Produksi Perikanan Tangkap Kec. Jangkar Tahun 2014.....	50
4.8 Unsur Pembentuk Modal Sosial pada Pola Kelembagaan KUD dalam Pengelolaan TPI	52
4.9 Aktivitas Ekonomi di TPI Jangkar	57
4.10 Proses Penarikan Retribusi Nelayan di Kabupaten Situbondo	59
4.11 Hubungan Kerja Antara Nelayan, Pengambe' dan <i>Blantik</i>	66
4.12 Kiri: Aktivitas TPI Pandean (sepi), Kanan: beberapa perahu nelayan yang mendarat	92
4.13 Disain Kelembagaan KUD Mina	95

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Hasil Wawancara dengan Informan
- B. Dokumen Perjanjian Kontrak KUD dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Situbondo



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki 17.506 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km (Dahuri et al. 2001). Di sepanjang garis pantai tersebut memiliki wilayah pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam hayati, non hayati, sumberdaya buatan dan jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun pada kenyataannya karakteristik laut tersebut belum dikelola secara optimal. Dari segi sosial ekonomi pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar justru merupakan kelompok masyarakat level paling bawah/miskin.

Pengembangan wilayah pesisir sebagai salah satu sektor yang strategis dalam pembangunan ekonomi, merupakan sektor yang masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat di berbagai negara seperti Indonesia masih menekankan peranan modal alam (*natural capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*) dan sering mengabaikan modal sosial seperti kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma-norma dan kebiasaan lokal.

Program pembangunan masyarakat pesisir diarahkan pada pengentasan kemiskinan nelayan dengan program pemberdayaan dengan pola pendekatan yang berbasiskan penguatan kelembagaan ekonomi, pemberdayaan kemampuan masyarakat dan memaksimalkan potensi lokal. Tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum masyarakat nelayan. Nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan buruh seringkali dikatakan sebagai kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah. Kemiskinan nelayan merupakan siklus peristiwa sosial ekonomi yang selalu berulang sepanjang tahun.

Seperti yang diungkapkan oleh Suyanto dalam Lukman Hakim (2009) kehidupan nelayan memiliki kerentanan yang tinggi, sedikit kegoncangan atau

kebutuhan mendadak akan menyebabkan nelayan menjadi *collapse*. Faktor penyebabnya adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari irama musim yang sulit di tebak, rendahnya pengetahuan tentang teknologi, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya pengetahuan tentang akses terhadap permodalan, serta hubungan ekonomi yang eksploitatif dengan penyedia modal informal dan belum berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi seperti TPI/KUD Mina secara optimal untuk membantu usaha nelayan (Kusnadi, 2003: 45). Kompleksitas permasalahan yang terdapat pada kehidupan nelayan menjadikan nelayan semakin berada pada kondisi yang memprihatinkan dan jauh darikata sejahtera.

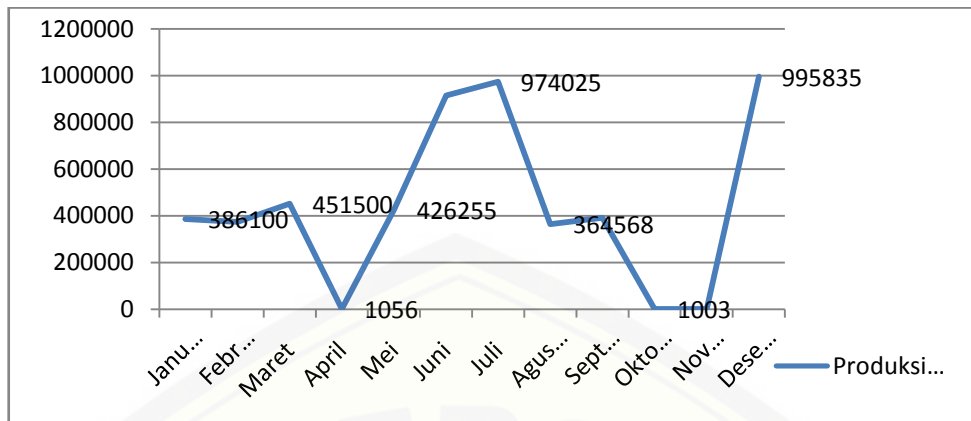
Peningkatan kesejahteraan nelayan dapat diusahakan melalui berbagai cara. Salah satunya, dengan melakukan optimalisasi peran TPI/KUD sebagai lembaga yang menampung dan mengelola hasil tangkapan ikan nelayan. Secara tegas Kusnadi, 2003 menyatakan bahwa TPI/KUD Mina tersebut merupakan unsur yang penting dan memiliki peran yang strategis bagi nelayan . Lembaga ekonomi tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup yang dihadapi oleh nelayan. Keberadaan TPI/KUD diharapkan mampu menjembatani ketimpangan hubungan sosial yang terjadi antara nelayan atau buruh nelayan dengan pangambek atau juragan. Ketimpangan hubungan tersebut berupa eksploitasi dari pihak juragan atau pangambek terhadap nelayan melalui permainan harga ikan tangkapan nelayan. Hal ini tentu saja sangat merugikan nelayan. Hubungan sosial tersebut merupakan sebuah proses interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi yang terjadi secara terus menerus dan membentuk sebuah norma atau aturan-aturan tertentu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan sosial tersebut.

Aturan-aturan atau norma-norma yang disepakati menjadi sebuah pedoman akan membentuk sebuah pola kelembagaan. Sebangun dengan yang diungkapkan oleh Yeager (1999 : 9) yang mengartikan kelembagaan sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Beberapa unsur penting dalam kelembagaan antara lain institusi, yang merupakan landasan untuk

membangun tingkah laku yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat dan telah diterima untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, peraturan dengan penegakan hukum, aturan dalam masyarakat yang memberikan wadah koordinasi dan kerjasama dengan dukungan hak dan kewajiban serta tingkah laku anggota, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, insentif. Kelembagaan lokal dan area aktifitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik administrasi lokal dan pemerintah, kategori sektor swasta organisasi keanggotaan dan koperasi, organisasi swasta organisasi jasa dan bisnis swasta. Kelembagaan yang terjadi pada masyarakat pesisir merupakan interaksi antara pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu seperti kesejahteraan.

Salah satu kelembagaan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah koperasi. Agar dapat mengambil peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan TPI sebagai kelembagaan lokal di wilayah pesisir harus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi bisnis yang berdaya saing. Koperasi nelayan sebagai bagian dari sistem kelembagaan ekonomi lokal masyarakat pesisir, diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap ketidakadilan nelayan. KUD sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat nelayan diharapkan mampu memberikan akses permodalan, bimbingan teknologi penangkapan, penjamin harga yang berpihak pada kepentingan nelayan terutama kepentingan nelayan anggotanya. Namun pada kenyataannya keberadaan TPI masih bersifat eksploratif dan KUD Mina sebagai sebuah lembaga perekonomian rakyat cenderung bersifat monopolistik, hampir semua koperasi nelayan di Kabupaten Situbondo tidak lebih hanya sebagai lembaga penarik retribusi sehingga keberadaannya belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat nelayan.

Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang memiliki panjang pantai ± 150 Km. Hal ini menjadikan Kabupaten Situbondo memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar. Berikut akan disajikan produksi perikanan tangkap pada tahun 2014, yaitu:

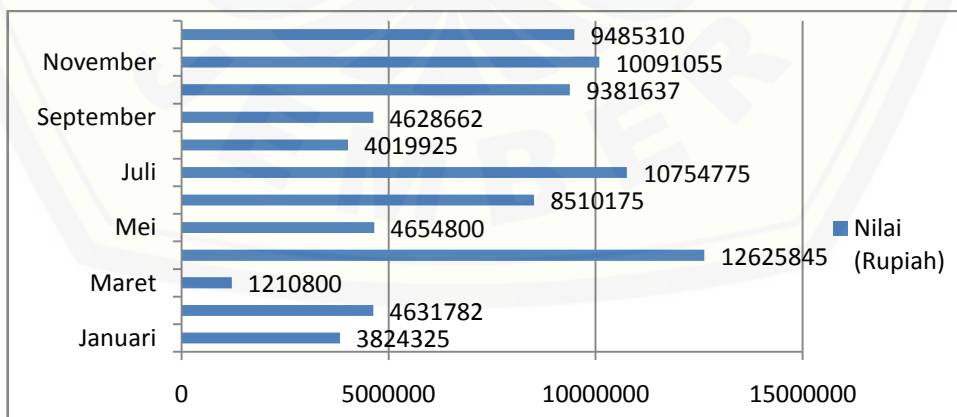


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2014, diolah

Gambar 1.1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Situbondo Tahun 2014

Rujukan data pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap berfluktuasi sepanjang tahun. Jumlah produksi tertinggi terjadi pada bulan November dengan jumlah produksi 995.835 ton. Sedangkan produksi terendah selama tahun 2014 terjadi pada bulan Oktober yaitu 1003 ton.

Namun jumlah produksi tangkap tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan nilai produksi yang ada, dimana nilai produksi merupakan hasil atau pendapatan yang diperoleh nelayan dengan cara mengalikan jumlah produksi dengan harga per masing-masing jenis ikan. Berikut akan disajikan Gambar 1.2 terkait nilai produksi selama tahun 2014, yaitu:



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan 2014, diolah

Gambar 1.2 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Situbondo Tahun 2014

Berdasarkan Gambar 1.2 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai produksi tertinggi terjadi pada bulan April yaitu Rp 12.625.845,-. Sedangkan nilai produksi terendah terjadi pada bulan maret yaitu Rp 1.210.800,-. Dari Gambar 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa nilai produksi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh jumlah produksi yang tinggi pula.

Kabupaten Situbondo memiliki delapan Koperasi nelayan sebagai pengelola tempat pelelangan ikan (TPI). Dalam hal ini, koperasi nelayan atau KUD menjadi salah satu lembaga yang keberadaannya paling dekat dengan nelayan. TPI merupakan sebuah sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk menjadi tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti penimbangan hasil tangkapan hingga transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan. Berikut akan disajikan nama KUD pengelola TPI yang terdapat di kabupaten Situbondo, yaitu:

Tabel 1.1 Nama TPI dan Pengelola di Kabupaten Situbondo

No	TPI	Pengelola	Alamat
1.	TPI Pandean	KUD Mina Selat Bali	Kecamatan Banyuputih
2.	TPI Pondok Mimbo	KUD Mina Rahayu	Kecamatan Banyuputih
3.	TPI Jangkar	KUD Mina Harta	Kecamatan Jangkar
4.	TPI Landangan	KUD Mina Makmur	Kecamatan Kapongan
5.	TPI Kilensari	KUD Mina Samudra Jaya	Kecamatan Panarukan
6.	TPI Gelung	KUD Mina Bahari Indah	Kecamatan Panarukan
7.	TPI Ketah	KUD Mina Sejahtera	Kecamatan Suboh
8.	TPI Besuki	KUD Mina Waspada Fajar Laut	Kecamatan Besuki

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015

Pada Tabel 1.1 terdapat delapan TPI yang pengelolanya di swakelola kepada pihak ketiga yaitu KUD Mina yang terdapat di masing-masing wilayah. Pengelolaan TPI kepada KUD Mina bertujuan untuk mengoptimalkan peran KUD Mina dalam meningkatkan pendapatan nelayan melalui kemandirian aktivitas ekonomi KUD.

Sejauh ini, keberadaan KUD memiliki peran yang masih terbatas sebagai pengelola TPI. Dalam hal ini, pengelolaan dilakukan dalam menarik retribusi atas jasa pendaratan dan penimbangan ikan yang dilakukan di TPI tersebut. Selanjutnya, KUD akan menyeteror hasil pemungutan retribusi tersebut kepada instansi terkait untuk kemudian di setorkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Belum optimalnya peran KUD Mina dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Salah satu penyebabnya adalah kepengurusan KUD yang masih carut marut dan belum bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Keberadaan KUD hanya sebagai lembaga pengelola retribusi TPI yang ditarik dari nelayan yang menimbang pada TPI tersebut. Di lain sisi, nelayan tidak merasakan manfaat dari penarikan retribusi tersebut. Hal ini menyebabkan nelayan beralih ke tempat lain untuk menimbang hasil tangkapan ikannya, seperti ke juragan darat. Pada tataran ini, nelayan menjadi semakin terikat kepada juragan darat, tidak hanya sebagai tempat menjual hasil tangkapannya namun juragan darat juga kerap kali menjadi tempat nelayan bersandar ketika kondisi keuangan mereka mengalami masa suram.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola ekonomi kelembagaan KUD di Kabupaten Situbondo?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengembangan KUD di Kabupaten Situbondo?
- c. Bagaimana disain kelembagaan KUD untuk meningkatkan pendapatan nelayan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk mendukung pemecahan rumusana masalah, antara lain :

- a. Menganalisis pola kelembagaan KUD di Kabupaten Situbondo.
- b. Memaparkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan KUD di Kabupaten situbondo?
- c. Merumuskan disain kelembagaan KUD untuk meningkatkan pendapatan nelayan

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan referensi baru untuk menambah kajian tentang pola ekonomi kelembagaan pada KUD nelayan dalam aktivitas pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) serta perannya dalam peningkatan pendapatan nelayan.
2. Kontribusi Praktis:
 - a. Memberikan informasi bagi peneliti yang lain terkait kelembagaan pada KUD dan TPI di Kabupaten Situbondo, serta memberi masukan pemikiran baru untuk dilakukan penelitian lanjutan bagi akademisi lain.
 - b. Bagi KUD sebagai pengelola TPI, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan terkait pola penguatan kelembagaan Koperasi nelayan dan TPI guna meningkatkan pendapatan nelayan .
 - c. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi penyusunan rencana dan penyusunan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan melalui penguatan ekonomi kelembagaan koperasi nelayan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 akan diuraikan mengenai landasan teori yang dipakai pada penelitian ini, seperti teori pembangunan, teori ekonomi kelembagaan, teori pendapatan, teori modal sosial, teori koperasi dan teori tempat pelelangan ikan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi Kelembagaan (*Institutional Economics*) adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Douglas North mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi (North, 1990 :360). Hal ini senada dengan North, Schmid (1972) yang mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sedangkan menurut Schotter (1981), kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang.

Secara ringkas Kelembagaan dapat diartikan sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*), aturan-aturan sosial kesepakatan (*conventions*) ,yang mengatur dan membatasi perilaku menyimpang manusia (*humanly devised*) yang dikukuhkan dengan adanya sanksi, regulasi perilaku yang diterima oleh anggota kelompok sosial, aturan main (*rules of the game*), aturan-aturan sosial, norma dan aturan dalam masyarakat, kesepakatan (*conventions*) (Hayami & Kikuchi (1987), Bardhan (1989), North (1994), Yeager (1999), dan Vant (2006)). Aturan-aturan tersebut akan menciptakan perilaku dalam interaksi manusia dan membentuk pola-pola perilaku yang menimbulkan tindakan kolektif ataupun

tindakan individu yang didasari oleh teori pilihan untuk memaksimalkan kepuasan (Commons, 1931 dan Vant, 2006).

Berdasarkan atas bentuknya (tertulis/tidak tertulis) North (1990) membagi kelembagaan menjadi dua: informal dan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis. Adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan dikelompokkan sebagai kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku baik pada level international, nasional, regional maupun lokal termasuk ke dalam kelembagaan formal.

Kelembagaan bertujuan mengurangi ketidakpastian melalui pembentukan struktur/pola interaksi (North, 1992). Atau untuk meningkatkan derajat kepastian dalam interaksi antar individu (Kasper dan Sterit, 1998). Sedangkan menurut Ostrom (1990) tujuan kelembagaan adalah untuk mengarahkan perilaku individu menuju arah yang diinginkan oleh anggota masyarakat serta untuk meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam masyarakat serta mengurangi perilaku oportunistik. Selain itu, kelembagaan juga harus dapat membatasi perilaku manusia yang cenderung berfikir strategik, rasional dan mengutamakan kepentingan diri sendiri; serta harus mampu mendistribusikan sumberdaya ekonomi secara adil dan merata (Libecap, 1989).

Dalam perkembangannya, terdapat dua macam Ekonomi Kelembagaan yakni Ekonomi Kelembagaan Lama (*Old Institutional Economics*) dan Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*). Ekonomi Kelembagaan Lama muncul pada awal abad ke-20. Menurut Rutherford (1994) dalam Arsyad (2010), Ekonomi Kelembagaan Lama ini dibangun dan berkembang di kawasan Amerika Utara, para tokohnya antara lain: Veblen, Commons, Mitchell dan Clarence Ayres. Ekonomi Kelembagaan selama ini

muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh Ekonomi Kelembagaan Lama mengkritik keras aliran neoklasik karena:

1. Neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala-kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*).
2. Penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational-maximizing self-seeking behaviour of individuals*).
3. Konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) serta bersifat statis.
4. Penolakan neoklasik terhadap preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan (Nabli&Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010).

Sementara itu, Ekonomi Kelembagaan Baru mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya (Nabli&Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010). Ekonomi Kelembagaan Baru menekankan pentingnya institusi, tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh Ekonomi Kelembagaan Baru. Menurut Ekonomi Kelembagaan Baru, institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar.

Arti penting dari Ekonomi Kelembagaan Baru adalah:

1. Ekonomi Kelembagaan Baru merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik, tetapi Ekonomi Kelembagaan Baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. salah satu permasalahan tersebut adalah eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Ekonomi Kelembagaan Baru merupakan sebuah paradigma baru di dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi.

2. Ekonomi Kelembagaan Baru begitu penting dan bermakna di dalam konteks kebijakan ekonomi sejak dekade 1990-an, karena Ekonomi Kelembagaan Baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. Ekonomi Kelembagaan Baru telah memosisikan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutions*). Ekonomi Kelembagaan Baru telah mengeksplorasi factor-faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak dan lain sebagainya sebagai satu jalan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Menurut Ekonomi Kelembagaan Baru, adanya informasi yang tidak sempurna, eksternalitas dan fenomena *free-riders* di dalam barang-barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar, sehingga kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan.
3. Ketika studi-studi pembangunan memerlukan satu landasan teoritis, Ekonomi Kelembagaan Baru mampu memberikan solusinya.

2.1.2 Teori Pendapatan

Pendapatan di definisikan sebagai jumlah seluruh penerimaan seperti total upah, gaji, keuntungan, bunga pembayaran, pendapatan dari sewa serta pendapatan lain, yang diterima oleh rumah tangga selama kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan (Sumardi, 1983; Case dan Fair, 1992; Samuelson dan Nordhaus, 1999). Pendapatan merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang.

Pendapatan rumah tangga perdesaan sangat ditentukan oleh mata pencaharian kepala keluarga. Pendapatan rumah tangga cenderung kecil apabila mata pencaharian utama kepala rumah tangganya adalah petani (Harrison, 1975) Sehingga konsep mata pencaharian (*livelihood*) sangat penting dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Strategi nafkah (*livelihood*) yang dikembangkan oleh Ellis (1998), dimana strategi ini terdiri dari dua sektor yaitu *on farm* dan *off farm*. Sektor *on farm* bersumber pada hasil pertanian dalam arti luas seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain. Hasil pertanian yang dimaksud bisa berasal dari lahan sendiri, sewaan

ataupun dari bagi hasil. Sedangkan sektor *off farm* masih merujuk pada sektor pertanian, namun pendapatan yang diterimanya berasal dari upah tenaga kerja dan hasil dari bagi hasil.

Strategi nafkah tersebut juga dapat dikembangkan oleh nelayan dengan melakukan diversifikasi usaha nelayan, misal dengan melakukan usaha pengolahan, budidaya ikan ataupun usaha lain diluar usaha perikanan.

2.1.3 Teori Modal Sosial

Konsep modal sosial pertama kali dikemukakan oleh Coleman (1988). Dalam tulisannya yang berjudul *Sosial capital in the creation of human capital*. Modal sosial dapat diartikan sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru, agregat sumberdaya aktual ataupun potensial yang diikat untuk untuk mewujudkan jaringan, akumulasi dari berbagai aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan yang mempengaruhi perilaku kerjasama, sebagai gambaran organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi, kerjasamayang saling menguntungkan (Coleman, 1988; Bordieu, 1993; Dhesi,2000; Putnam, 1993 dalam Yustika, 2012).

Modal sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah kehidupan masyarakat, dimana modal sosial berperan sebagai pengikat sebuah struktur dalam masyarakat. Bahkan, Ostrom (1992) dalam Anynomus (2012) menyatakan bahwa modal sosial merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan pembangunan. Modal sosial dapat menjadi basis sumberdaya ekonomi, menjadi alternatif untuk mengalokasikan kegiatan ekonomi secara efisien jika pasar tidak dapat mengerjakannya. Dimana kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pasar tidak sanggup untuk mengatasi persoalan eksternalitas, barang publik, hak kepemilikan dan bahkan monopoli. Pada aras ini, modal sosial diharapkan mampu menjadi jembatan dan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat ketidak mampuan pasar dalam memecahkan masalah-masalah tersebut.

Melekatnya modal sosial pada struktur sosial dimana masyarakat itu tinggal menunjukkan bahwa modal sosial baru eksis apabila berinteraksi dengan struktur sosial. Sebangun dengan hal tersebut, Coleman, (1988 : 98) mengelompokkan modal sosial menjadi tiga bentuk :

1. Struktur kewajiban (*obligations*), ekspektasi (*expectation*), kepercayaan (*trustworthiness*). Pada tahapan ini, modal sosial akan melahirkan sebuah kewajiban sosial terhadap masyarakat dan memberikan pengharapan/ekspektasi terhadap sesuatu hal yang terjadi pada struktur sosial. Proses yang terjadi secara terus menerus antara keduanya akan melahirkan sebuah kepercayaan yang terbangun diantara masyarakat.
2. Jaringan informasi (*information channels*)
Modal sosial yang terbangun pada struktur sosial akan menciptakan sebuah sistem atau jaringan informasi yang mampu menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Jaringan informasi ini dapat menjadi sebuah peluang ekonomi yang bisa diakses oleh struktur sosial tempat modal sosial itu lahir.
3. Norma dan sanksi yang efektif (*norm and effective sanctions*)
Modal sosial yang terbangun akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila diikuti dengan adanya sanksi dan norma yang diberikan ketika terdapat sebuah pelanggaran/perilaku menyimpang yang terjadi pada struktur sosial tersebut.

Dengan demikian, terlihat bahwa modal sosial merupakan proses yang selalu berulang akibat adanya hubungan transaksi ekonomi yang menghasilkan pencapaian yang bagus, dimana dalam jangka panjangnya akan melahirkan ekspektasi yang lebih baik dan bukan hanya sekedar relasi ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yustika, (2012 : 141) bahwa modal sosial dalam bentuk ekspektasi dan kepercayaan akan memberikan kemampuan bagi pelakunya dalam mengakses keunggulan untuk mendapatkan benefit ekonomi.

2.1.4 Koperasi

Dalam pasal 33 UUD 1945 koperasi dipahami sebagai lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri di banding lembaga lain. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama, dalam KUHD koperasi didefinisikan “koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial” sehingga dalam pengertian ruang lingkup yang seperti itulah banyak kalangan yang beranggapan koperasi hanya sebuah lembaga yang berusaha untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi.

Berdasarkan **UU No. 12 tahun 1967**, koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya orang-orang yang termasuk dalam tatanan ekonomi bersifat usaha bersama dan berazaskan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi oleh badan hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, yaitu: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan dan memiliki prinsip prinsip, yaitu pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi, pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya, koperasi harus bersifat mandiri, dan balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.

Koperasi merupakan organisasi yang dicanangkan dan didukung oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Menurut Chronographer (2010) keadaan ekonomi dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan, jenis pekerjaan dan jumlah tanggungan dalam keluarga.

Pendapatan sering dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan keberhasilan perekonomian suatu negara.

Pendapatan adalah penerimaan bersih yang didapatkan seseorang dari hasil usahanya. Menurut Sukirno (2006 : 47) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1. Pendapatan pribadi, yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
2. Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
3. Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Kehadiran Koperasi perikanan di Indonesia sebenarnya sudah lama, jauh sebelum Kemerdekaan RI. Perkumpulan nelayan yang bekerja dalam bentuk Koperasi diawali pada tahun 1912 di Tegal, kemudian berkembang di Karesidenan Pekalongan, Cirebon, dan Semarang yang secara berurutan sebagai berikut:

1. Misoyo Mino di Tegal tahun 1912;
2. Saya Sari di Sawo Jajar, Brebes tahun 1916;
3. Ngupoyo Mino di Batang tahun 1916;
4. Misoyo Sari di Tanjung Sari, Pemalang tahun 1919 ;
5. Mino Soyo di Wonokerto, Pekalongan tahun 1919;
6. Saya Sumitra di Indramayu tahun 1919;
7. Misaya Mina di Eretan, Indramayu tahun 1927;
8. Ngupaya Mina di Dadap, Indramayu tahun 1930;
9. Mino Sroyo di Bandengan, Kendal tahun 1932;
10. Misoyo Ulam di Semarang tahun 1933; dan
11. Pabelah Bumi Putera di Gebang Ilir, Cirebon tahun 1933 (Soewito, *et.al.*, 2000). dalam Dahuri (2005) Berbagai Koperasi perikanan (nelayan) tersebut

pada awalnya hanya menyelenggarakan jual beli ikan hasil tangkapan melalui pelelangan, kemudian berkembang dengan mengadakan biaya perkreditan untuk usaha penangkapan .

Meskipun pergerakan Koperasi perikanan di Indonesia mengalami banyak kendala dan permasalahan, namun secara kuantitatif Koperasi perikanan mengalami pertumbuhan cukup pesat. Pada tahun 2003 jumlah KUD Mina di seluruh Indonesia mencapai 887 buah (DKP, 2003) dan sekitar 15 PUSKUD Mina/Pusat Koperasi Perikanan (PKP) (IKPI, 2005). Permasalahan utama koperasi nelayan adalah bahwa sebagian besar Koperasi perikanan sampai saat ini belum berkinerja secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Adapun kendala dan permasalahan yang menyebabkan kinerja Koperasi perikanan pada umumnya rendah adalah:

- (1) Kualitas sumberdaya manusia (SDM) pengurus dan pengelola Koperasi perikanan sebagian besar masih rendah,
- (2) Lemahnya manajemen,
- (3) Kurangnya permodalan,
- (4) Ulah para pengusaha sebagai kompetitor Koperasi,
- (5) Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tentang arti pentingnya Koperasi,
- (6) kurangnya keberpihakan pemerintah kepada Koperasi perikanan. Pada umumnya kualitas SDM pengurus dan pengelola Koperasi perikanan tidak memiliki kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) yang memadai, baik dalam hal manajemen dan organisasi Koperasi maupun dalam hal teknis dan bisnis perikanan. Selain kelemahan teknis manajemen. Sering kali para pengurus dan pengelola Koperasi perikanan juga dilanda penyakit moral (moral hazard), kerja malas, tidak kreatif dan tidak produktif, tetapi korupsi.

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Utomo pada tahun 1991 mengadakan penelitian mengenai Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam stabilitas dan Pembentukan Harga Ikan

Laut Tangkapan Nelayan di Kotamadya Manado dan Bitung. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa saluran pemasaran ikan kotamadya Manado dan Bitung ada 2 model/cara dimana masing-masing model/cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Model/cara 1 salurannya lebih panjang, ini selanjutnya akan mempengaruhi harga ikan yang biasanya konsumennya lebih tinggi. Provitabilitas usaha tengkulak desa dan grosir baik di Manado dan Bitung memang ada perbedaan namun tidak terlalu tinggi. Dari perbedaan yang tidak terlalu tinggi, maka kita dapat mengatakan harga ikan di Manado dan Bitung agak stabil.

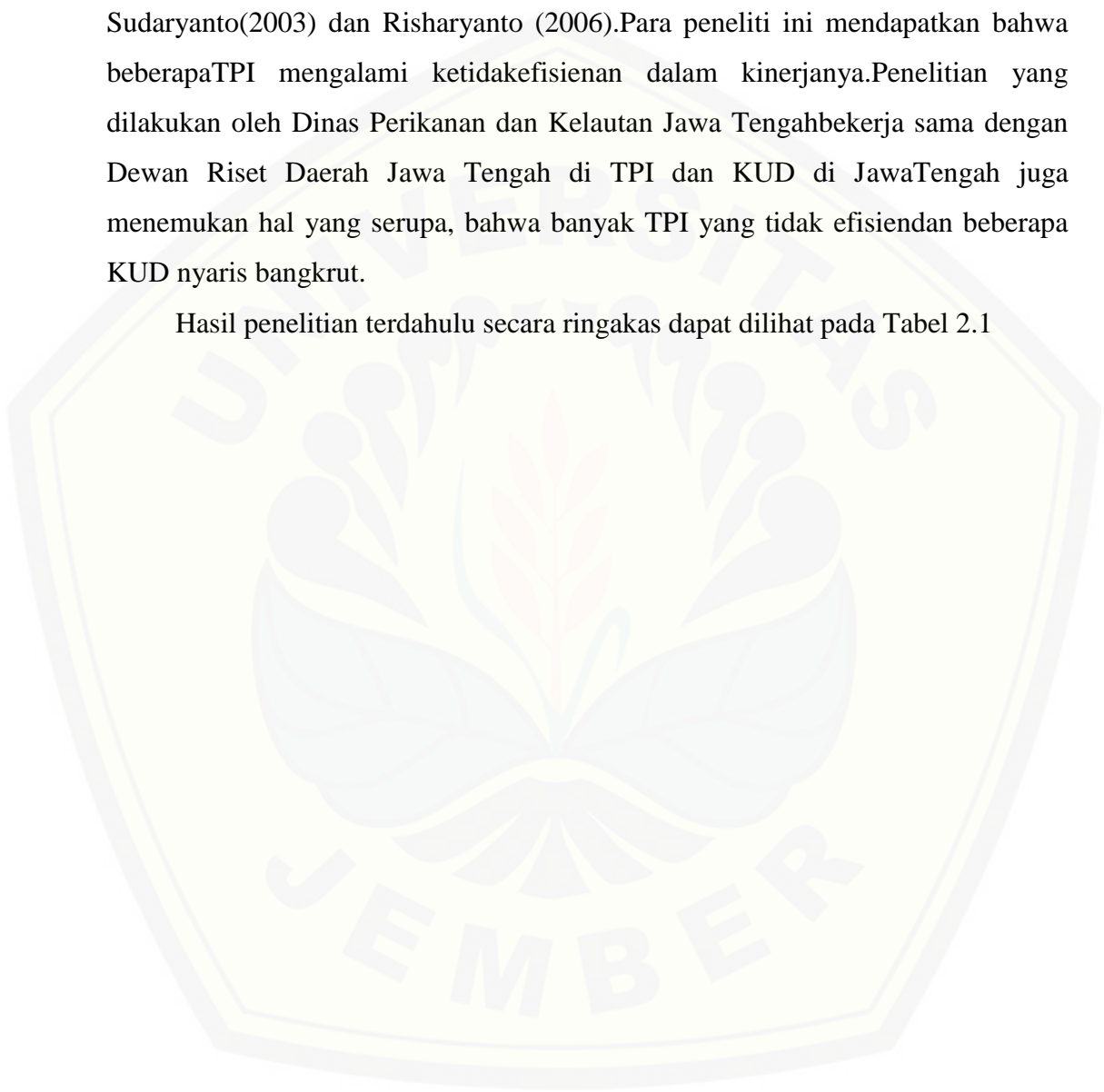
Mahyuddin pada tahun 2001 menganalisis peranan TPI sebagai tempat untuk menjual hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu. Sebagai tempat pelelangan ikan yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, TPI merupakan salah satu mata rantai dalam tata niaga ikan. Dari hasil penelitian ini dapat bahwa kondisi manajemen KUD belum baik, SDM pengurus masih rendah tingkat pendidikannya dan kurang luas pengetahuan dan pengalamannya, sikap dan perilaku pengurus yang kurang disenangi anggotanya, modal KUD yang belum memadai sehingga mengakibatkan KUD tidak mengakibatkan dalam alam nelayan setempat, untuk selanjutnya pelelangan ikan tidak dapat dijalankan yang mengakibatkan nilai jual yang seharusnya besar, namun hasil yang didapatkan kecil. Dengan alat analisis Indeks Relatif Nilai Produksi (I) diperoleh angka 1,27, dengan rata-rata peningkatannya sebesar 8,2 % pertahun. Ini berarti kualitas pemasaran ikan di PPN Pelabuhanratu baik.

Suyanto pada tahun 2003 melakukan penelitian di berbagai desa pantai di Propinsi Jawa Timur, dimana komunitas desa pantai, khususnya nelayan tradisional pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada hasil laut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kehidupan nelayan tradisional sangat jauh berbeda dengan juragan kapal atau nelayan modern. Para nelayan tradisional seringkali hidup serba pas-pasan (28,5%), relatif kekurangan (17,5%) atau bahkan sangat kekurangan (16%). Berdasarkan kajian eksistensi pelelangan ikan, dari aspek ekonomik melihatnya dengan proses pelelangan ikan, maka nelayan dapat diuntungkan dengan adanya harga jual ikan standart. Selain itu pembeli memperoleh keuntungan karena harga beli ikan

yang cukup wajar. Sedangkan pemerintah daerah mendapat keuntungan berupa PAD. Kemudian masyarakat secara tidak langsung akan merasakan denyut perekonomian karena adanya aktivitas pelelangan ini.

Kajian efisiensi dan kinerja TPI dilakukan oleh Diah (2006), Sudaryanto (2003) dan Risharyanto (2006). Para peneliti ini mendapatkan bahwa beberapa TPI mengalami ketidakefisienan dalam kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah bekerja sama dengan Dewan Riset Daerah Jawa Tengah di TPI dan KUD di Jawa Tengah juga menemukan hal yang serupa, bahwa banyak TPI yang tidak efisien dan beberapa KUD nyaris bangkrut.

Hasil penelitian terdahulu secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1



Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Sebelumnya

No	Nama /Tahun/Judul	Tujuan /Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Edho Cahya Kusuma (2014) Analisis Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir Terhadap Keberdayaan Istri Nelayan Melalui Peran Koperasi (Studi Kasus Rumah Tangga Masyarakat Pesisir Kecamatan Puger)	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis konsep kebijakan pembngunanwilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi LEPP-M3 - Mendeskripsikan pandangan ekspert terkait kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan Desa puger wetan dan puger kulon Kecamatan Puger Kab. Jember melalui peran Koperasi LEPP-M3 ditinjau dari aspek efektifitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan - Menganalisis konsep kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan dalam proses ekspert. <p>Metode Analisis : Pendekatan kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur yang berhubungan serta survey lapangan baik melalui kuisisioner maupun wawancara Melalui metode Analitik Hirarki Proses (AHP),</p>	<p>Hasil penelitian</p> <p>Efisiensi menjadi aspek yang paling signifikan menerima dampak kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan. Dari 4 level dalam studi AHP, level 1 menunjukkan skala prioritas secara berurutan diperoleh aspek efisiensi dengan bobot nilai (0,300), berikut aspek efektivitas (0,269), aspek responsivitas (0,260), dan aspek ketepatan (0,169). Adapun kriteria level 2 dari masing-masing aspek memperlihatkan 4 kriteria dampak yang dominan, yaitu berfungsinya kelompok masyarakat, pemanfaatan koperasi, ketergantungan terhadap program, dan terciptanya kesempatan kerja baru. Selanjutnya, dari hasil level 1 dan level 2 tersebut mendorong level 3 untuk memberikan alternatif perlunya kebijakan baru yang lebih baik dalam penerapan konsep kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi di Kecamatan Puger. Pada level akhir tawaran konsep kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi di Kecamatan Puger menjadi penting untuk diterapkan dengan model perencanaan yang berkelanjutan (<i>sustainability planning</i>).</p>
2	Widigdho, 2013. “ Optimalisasi Peranan KUD Nelayan Dalam Mewujudkan KetahananEkonomi Keluarga “	<p>Tujuan :</p> <p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peran KUD Mina Samudra Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga nelayan b. Kendala kendala apa saja ynag dihadapi KUD c. Strategi optimalisasi KUD Mina Samudra 	<p>Hasil penelitian</p> <p>Diperlukan kebijakan pimpinan koperasi tentang adanya perubahan peraturan dalam hal simpan pinjam koperasi untuk anggota koperasi nelayan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan SDM melalui diadakan kursus-kursus bagi para anggota koperasi nelayan dan menumbuhkan iklim

		<p>dalam meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan</p> <p>Metode Analisis : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis teks tertulis</p>	<p>usaha yang kondusif dengan kerja keras , disiplin dan kejujuran serta keterbukaan melalui peningkatan penguasaan teknologi, informasi, kualitas keanggotaan koperasi.</p> <p>b. perlunya kebijakan dan implikasi dari pimpinan koperasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat nelayan terhadap KUD Mina Samudera bahwa koperasi tersebut akan berupaya untuk melayani anggota koperasi nelayan lebih baik lagi dan penuh dengan kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan dan pembagian SHU kepada anggota koperasi. Hal tersebut dapat mengoptimisasi peranan KUD Mina Samudera yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga nelayan guna mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.</p>
3	<p>Indarti dan wardana, 2013 “Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang”</p>	<p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi kelembagaan lokal koperasi nelayan - Menganalisis faktor yang mempengaruhi kelembagaan koperasi nelayan - Menyusun model penguatan kelembagaan koperasi nelayan <p>Metode Analisis : Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan SWOT matrix.</p>	<p>Beberapa manfaat yang diperoleh nelayan jika melakukan kerja sama melalui koperasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun economies of scale dalam setiap transaksi di pasar input maupun pasar output. Dengan demikian akan tercapai efisiensi dan peningkatan daya tawar yang mendorong kenaikan harga di pasar output dan penurunan harga di pasar input. 2. Memperoleh external economies yaitu meningkatnya produktivitas karena peluang kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak eksternal semakin terbuka. 3. Memperoleh manfaat-manfaat non-ekonomis karena adanya penyatuan individu ke dalam kelompok. Dengan demikian, keputusan nelayan untuk bergabung ke dalam suatu koperasi merupakan keputusan strategis dan relevan untuk penguatan daya tawar di pasar input dan output, serta penguatan daya kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal lainnya. 4.

4	Irawan, 2013. “ Analisis Efisiensi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Provinsi Banten dan Pengembangannya untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan “	<p>Tujuan : Untuk menanalisis Efisiensi pengelolaan TPI di Provinsi Banten dan mengkaji kemungkinan Pengembangan TPI</p> <p>Metode Analisis : Metode yang digunakan dengan metode deskriptif eksploratif dengan menggunakan analisis data Envelopment Analisis (DEA)</p>	Berdasarkan anlisis input output fisik dua TPI telah memiliki skor efisiensi relative yaitu TPI binuanguen dan tpi Kronjo, sedang 3 TPI belum mencapai skor efisien yaitu TPI Labuan 2, TPI Karang amtu, TPI Bojonegoro. Untuk mencapai nilai efisien maka perlu diadakan pengurangan ataupun penambahan pada input dan output TPI tersebut.
5	Hertanto dkk 2013 “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Jepara	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana peran pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara</p> <p>Metode Analisa metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitatif J. Lexy Moleong yang terdiri dari : a. Pengumpulan seluruh data b. Reduksi data c. Penyajian data (Display data) d. Pengambilan keputusan atau verifikasi</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk meminimalisir kondisi tersebut. Terkait peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara, saran yang diberikan yakni, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, melakukan evaluasi kinerja pegawai yang terlibat dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan, serta meningkatkan dukungan seluruh lapisan masyarakat.
6	Hendrik 2013 “Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) KEC. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	<p>Tujuan : Untuk mengetahui peranan TPI Tanjung Beringin dalam pemasaran dan peningkatan pendapatan nelayan di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara</p> <p>Metode Analisis: Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara</p>	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. TPI Tanjung Beringin berperan sebesar 33,8% dalam pemasaran hasil perikanan Kecamatan Tanjung Beringin. Jumlah armada yang menjual ikan di TPI sebanyak 19,5%, alat tangkap 20,1% dan jumlah nelayan sebanyak 10,5%, jika dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Beringin. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, TPI hanya berperan sebesar 10,5% dalam memasarkan produksi ikan di Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Harga ikan di TPI berkisar antara Rp 6.000 untuk ikan campur dan Rp 15.000 untuk ikan kembung,

			<p>sedangkan harga ikan diluar TPI lebih murah Rp 1.000 – Rp 2.000 per kilogram.</p> <p>3. Retribusi yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat 40%. Dari jumlah retribusi yang dialokasikan untuk kesejahteraan nelayan hanya sebesar 5%.</p>
7	<p>Lubis, dkk. 2012</p> <p>Besarann kerugian nelayan dalam pemasaran hasil Tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu</p>	<p>Tujuan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh ketergantungan nelayan dalam memperoleh permodalan melaut dan berapa besarkah kerugian yang sebenarnya terjadi.</p> <p>Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kasus ketergantungan nelayan pada tengkulak di PPN Palabuhanratu melalui analisis deskriptif kuantitatif.</p>	<p>Hasil :</p> <p>Penelitian ini telah mendapatkan hasil bahwa sebagian besar (90 %) nelayan PPN Palabuhanratu memanfaatkan tengkulak khususnya untuk memperoleh permodalan melaut. Hal ini dikarenakan proses meminjamannya lebih mudah, tanpa agunan namun sebagian besar hasil tangkapan harus dijual pada tengkulak tanpa melalui pelelangan. Berdasarkan hasil perhitungan, nelayan merugi antara Rp 2000,00 sampai Rp 5000,00/kg apabila hasil tangkapannya dijual kepada tengkulak. Selain itu kerugian juga karena pembelian solar di tengkulak atau pengecer berbeda Rp 1000,00/liter dengan harga SPBU khususnya nelayan pancing dan gillnet. Peran pelabuhan perikanan kiranya perlu dioptimalkan dalam mengupayakan penyediaan perbekalan melaut dan terlaksananya sistem pelelangan ikan secara menyeluruh agar nelayan kecil memiliki posisi tawar dalam tata niaga perikanan dan mendapatkan hasil penjualan secara cash.</p>
8	<p>Aryo Fajar S, 2011</p> <p>Analisa Interaksi Simbolik yang Membentuk Pola Komunikasi Dinamis pada Komunitas Pesisir Kab. Jember</p>	<p>Tujuan penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui bagaiman nelayan membngun interaksi menjadi proses sosial yang mendorong terciptanya system sosial komunikasi di lingkungan pesisir • Untuk mengetahui bagaimana nelayan memanfaatkan status dan perannya dalam memanfaatkan jaringan di lingkungan pesisir menjadi potensi sosial yang menguntungkan • Untuk mengetahui apakah pola interaksi yang 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interaksi yang terjadi pada hubungan nelayan karena adanya kontak sosial pada aktivitas kegiatan di pesisir b. Keberadaan status simbol memperkokoh kedudukan seseorang di dalam komunitas masyarakat pesisir sebagai penanda eksistensi diri. Yang menjadi unsure esensial dalam terlaksananya aktivitas hubungan kerja dan hubungan sosial di dalam komunitas masyarakat

		<p>terdapat pada jaringan sosial ekonomi masyarakat pesisir selatan memberikan kontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan nelayan dan keluarganya</p> <p>Metode Penelitian Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen</p>	<p>pesisir.</p> <p>c. Pola interaksional didayagunakan dan membentuk hubungan sosial timbale balik yang berbasis ikatan kekerabatan ketetanggaaan, pertemanan sehingga dalam jaringan sosial akan memudahkan dalam memperoleh akses sumberdaya baik uang, jasa ataupun barang melalui pertukaran timbale balik diantara anggotanya.</p>
9	<p>Michel Sipahelut (2010) Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara</p>	<p>Tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1) Menilai implikasi program PEMP terhadap keragaan sosial, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat nelayan di lokasi penelitian. 2) Merumuskan strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat nelayan di lokasi penelitian. 3) Menentukan prioritas strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di lokasi penelitian.</p> <p>Metode Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis yang digunakan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) analisis deskriptif, untuk menilai implikasi program PEMP terhadap keragaan sistem usaha perikanan di lokasi penelitian; (2) analisis SWOT, untuk merumuskan strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat pesisir di lokasi penelitian; dan (3) AHP untuk menentukan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang telah dirumuskan analisis SWOT di lokasi penelitian 	<p>Hasil Program PEMP telah memicu perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan penting pada aspek sosial budaya adalah menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yaitu nilai kejujuran, keterbukaan, dan gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP), kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi LEPP-M3. Pembentukan kelembagaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian terhadap pengembangan usaha mereka dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.</p>
10	<p>Setiarso, dkk (2010) "Analisis Efisiensi Tempat PELLELANGAN IKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PENGELOLA</p>	<p>Tujuan : Menganalisis tingkat efisiensi TPI Menalisis tingkat keberdayaan pengelola TPI</p> <p>Metode Analisis:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari 9 TPI yang terdapat di Kab. Cilacap hanya terdapat 1 TPI yang tidak Efisien. 2. Pengelola TPI memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi

	Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Cilacap:	Pendekatan non parametrik DEA Analisa menggunakan SWOT	3. Strategi pemberdayaan yang paling tepat untuk pengembangan TPI adalah penetrasi pasar dan pengembangan TPI/KUD
11	Otniel Pontoh , 2010 Identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan Masyarakat nelayan desa gangga dua kabupaten minahasa utara	Tujuan penelitian yang bertujuan mendapat kan gambaran tentang identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Metode eksploratif dan deskriptif melauli studi kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil analisis terhadap masyarakat nelayan tersebut dapat di simpulkan bahwa mereka memiliki tipologi modal sosial terikat beserta penyebabnya menyiratkan perlunya kebijakan dalam rangka meningkat modal sosial di masyarakat nelayan tersebut. • Organisasi sosial yang ada di Desa Gangga Dua adalah Rukun Duka, Musyawarah Kekeluargaan Masyarakat Desa, Pesta Perkawinan, Perkumpulan Muda-Mudi, Perkumpulan Ibu-Ibu Majelis Tahlim, Arisan Bahan Bangunan, Usaha Simpan Pinjam dan Rukun Remaja.
12	Sartika, 2010 Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan	Tujuan Untuk mengevaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan komponen-komponen yang diperkenalkan oleh Akib (2009; 11) di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari a) sumber data primer, yaitu melalui wawancara dengan, para nelayan, para pelaku usaha perikanan	Hasil program pemberdayaan selama ini hanya dirasakan sesaat ketika bantuan diberikan. Karena ketidakjelasan program, maka bantuan finansial yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha dalam jangka panjang, pada akhirnya hanya digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi pada program pemberdayaan bantuan usaha perikanan dan dana bergulir. Secara nyata, belum terasa dampak signifikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Pangandaran dalam jangka panjang.
13	Sulistyo, dkk, 2009 “Pemberdayaan Istri Nelayan Melalui Koperasi Unit Desa (Kud) (Studi Pada Kud Mina Jaya Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)”	Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan istri nelayan melalui KUD Mina Jaya di Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang beserta kendala-kendala yang dihadapi Metode Analisis : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif Analisis data menggunakan metode analisis interaktif	Hasil penelitian ini adalah peran KUD yang memberdayakan istri nelayan dengan membuat abon ikan tuna. Kendala yang dihadapi antara lain adalah dana yang masih terbatas dari KUD dan DKP Kabupaten Malang membuat beberapa produsen abon berhenti produksi, sosialisasi dan pelatihan oleh DKP yang tidak berkelanjutan, serta kualitas SDM dari KUD dan para nelayan yang masih rendah

14	Melani, dkk, 2009. “Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan (studi kasus: koperasi serba usaha citra nelayan tanjungungat kecamatan bukit bestari kota tanjungpinang)”	<p>Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui peranan koperasi Serba Usaha Citra Nelayan di daerah pemukiman nelayan di Tanjungungat. 2. Membantu memberikan solusi pengembangan koperasi yang tepat agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan koperasi.</p> <p>Metode Analisis Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara kepada pengurus koperasi dan nelayan . Pengolahan data menggunakan analisis sitem</p>	<p>Berdasarkan analisis pasar yang telah dilakukan, KSU Citra Nelayan belum mampu memanfaatkan potensi pasar yang ada seefisien dan seefektif mungkin. Kenyataan ini berkaitan dengan masih rendahnya SDM anggota serta hasil tangkapan yang masih rendah sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Solusi pengembangan KSU Citra Nelayan dimasa depan agar dapat lebih berperan aktif bagi peningkatan kesejahteraan anggota antara lain a. Mengembangkan sistem penangkapan ikan yang lestari dan berkelanjutan; 2. Manfaatkan sumberdaya manusia yang ada untuk meningkatkan hasil dengan perbaikan penggunaan alat tangkap; 3. Melakukan pelatihan peningkatan keterampilan teknis perikanan serta pelatihan pengembangan jiwa wirausaha bagi anggota; 4.Tingkatkan kemampuan manajerial melalui pengembangan unit usaha pemasaran. Jalin kerjasama kemitraan dengan perusahaan inti; 5. Merintis usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki nilai tambah; 6. Diversifikasi produk olahan perikanan yang bernilai jual tinggi; 7.Terlibat aktif dalam pengawasan sumberdaya perairan laut dan cegah penggunaan alat tangkap yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (pukat harimau, dsb).</p>
15	Anissa Yustiarani (2008 Kajian Pendapatan Nelayan Dari Usaha Penangkapan Ikan Dan Bagian Retribusi Pelelangan Ikan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (Ppi) Muara Angke)	<p>Tujuan : Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) Menentukan tingkat pendapatan nelayan usaha penangkapan ikan di wilayah komunitas sekitar PPI Muara Angke 2) Menganalisis hak-hak yang diterima nelayan sebagai kompensasi dari bagian retribusi pelelangan ikan.</p> <p>Metode Analisis : Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah <i>purposive sampling</i> untuk menentukan tingkat pendapatan nelayan usaha penangkapan ikan dan menganalisis hak-hak yang</p>	<p>Terdapat perbedaan hak-hak yang diterima antara nelayan anggota Koperasi Mina Jaya dengan nelayan yang bukan anggota Koperasi Mina Jaya sebagai kontribusi retribusi pelelangan ikan. Hak-hak yang diterima nelayan yang merupakan anggota koperasi Mina Jaya adalah mendapatkan asuransi jiwa, mendapatkan dana pakeklik, dapat menjadi anggota HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), dapat meminjam modal usaha pada Koperasi Mina Jaya, dapat menghadiri RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada akhir tahunnya. Dalam kenyataan di lapangan, hak-hak tersebut semuanya</p>

		diterima nelayan sebagai kompensasi dari bagian retribusi pevelangan ikan	memang telah didapatkan oleh para nelayan. Hak nelayan yang bukan merupakan anggota koperasi hanya mendapatkan asuransi jiwa dan mendapatkan dana pakeklik.
16	Yulistiyono, 2008. " Evaluasi Penguatan Klembagaan Koperasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bangkalan	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Identifikasi kondisi kelembagaan lokal koperasi nelayan; (2) Analisis kondisi eksisting yang mempengaruhi kelembagaan koperasi nelayan; dan (3) Menyusun pola/bentuk penguatan kelembagaan koperasi Nelayan <p>Metode Analisis :</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dimana survey melalui observasi, wawancara terhadap instansi terkait dan deep interview terhadap 120 responden masyarakat nelayan</p>	<p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Excisting mengenai kelembagaan koperasi nelayan pada obyek penelitian, rendahnya kesadaran nelayan/responden terhadap pentingnya pendidikan sehingga berdampak pada pola pikir dan kebiasaan nelayan dalam menjalankan model usahanya, sebagai besar nelayan/responden tidak mempunyai alternatif pekerjaan selain nelayan, dan Pengetahuan responden tentang koperasi masih rendah, masih diperlukan perlakuan pemberdayaan yang berkelanjutan baik yang difasilitasi oleh masyarakat nelayan itu sendiri atas kesadaran sendiri maupun difasilitasi oleh pemerintah. 2. Beberapa manfaat apabila sekelompok nelayan melakukan kerja sama melalui koperasi, antara lain: (a). Membangun economies of scale dalam setiap transaksi di pasar input maupun pasar output. Dengan demikian akan tercapai efisiensi dan peningkatan daya tawar yang mendorong kenaikan harga di pasar output dan penurunan harga di pasar input. (b). Memperoleh external economies yaitu meningkatnya produktivitas karena peluang kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak eksternal semakin terbuka. (c). Memperoleh manfaat-manfaat non-ekonomis karena adanya penyatuan individu ke dalam kelompok. 3. Berdasarkan kepada tujuan aliansi strategis, yang antara lain berbentuk koperasi, maka dapatlah melakukan antara lain: (a). Membangun skala 18 operasi, (b). Membangun kemampuan inovasi secara berkesinambungan dan (c). Maju lebih cepat dari pesaing.

17	<p>Tri Widayati (2008) Analisis Efisiensi Teknis Tempat Pelelangan Ikan Dan Tingkat Keberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Serta Strategi Pemberdayaannya Di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah</p>	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis tingkat efisiensi TPI di daerah penelitian 2. Menganalisis tingkat keberdayaan pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan pengurus KUD di daerah penelitian 3. Menganalisis strategi pemberdayaan yang tepat agar TPI, pengelola TPI dan KUD menjadi berdaya <p>Metode Analisis : Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah <i>Multistages Sampling</i>. Sampel yang digunakan adalah pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan Pengurus Koperasi Unit Desa Mina, dengan jumlah responden sebanyak 90 orang.</p>	<p>Hasil penelitian :</p> <p>Mmenunjukkan bahwa ada beberapa TPI yang belum efisien. TPI yang memiliki skor efisiensi 100 % adalah TPI Mojo, TPI PPNP, TPI Pelabuhan, TPI Ketapang, TPI Tanjungsari, TPI Klidang Lor dan TPI Asemtoyong. TPI Tegalsari mempunyai skor efisiensi 22,34 %, TPI Muarareja skor efisiensinya 47,71 %, TPI Surodadi 66,92 %, TPI Wonokerto 74,37 %. Tingkat keberdayaan pengelola dilihat dari aspek ekonomi maupun non ekonomi menunjukkan bahwa keberdayaan dalam melakukan tupoksi masih kurang berdaya, namun untuk kemampuan lobi masuk katagori intens.</p> <p>Strategi untuk pemberdayaan TPI antara lain, untuk prioritas pertama adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI. <i>Kedua</i>, mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem, <i>ketiga</i> meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan.</p>
18	<p>Omat, 2008 Implikasi keberadaan ppi terhadap pertumbuhan Kawasan ekonomi perikanan (studi kasus: ppi karangsong kecamatan indramayu Provinsi jawa barat)</p>	<p>Tujuan Penelitian : enelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi keberadaan PPI sebagai sarana kegiatan perikanan terhadap pertumbuhan kawasan ekonomi perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong Kecamatan Indramayu dan merumuskan strategi pengembangan kawasan ekonomi perikanan.</p> <p>Metode Penelitian : Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian :</p> <p>Hasil penelitian diperoleh bahwa kegiatan perikanan yang berlangsung pada kegiatan hulu dan hilir telah menciptakan nilai pendapatan diantaranya nilai pendapatan yang diperoleh pemerintah (1,6 %) sebagai penyedia sarana PPI Karangsong dan pihak pengelola PPI Karangsong yakni KPL Mina Sumitra, yang meliputi nilai pendapatan dari alokasi penyelenggaraan (1,65 %) dan operasional TPI (0,80 %), kemudian nilai pedapatan yang diperoleh bakul ikan memperoleh keuntungan marjinal dari hasil memasarkan ikan untuk wilayah lokal (11,23 %) dan pemasaran di luar Wilayah Indramayu (14,41 %).</p> <p>Kegiatan perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong saat ini telah menstimulir pertumbuhan kawasan ekonomi</p>

			<p>melalui rantai nilai kegiatan perikanan yaitu tumbuhnyakewirausahaan dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang didasarioleh adanya pemanfaatan sumber daya pesisir kelautan (alam, manusia, kelembagaan danmodal), yang dapat menciptakan aktivitas pada pelaku usaha dalam keterkaitan kegiatan perikanan, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dalam permasalahan perolehan nilai pendapatan bagi nelayan pencari ikan (Buruh nelayan) dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan adalah melakukan hubungan kerjasama antara pihak perbankan dengan koperasi (<i>lingkage program</i>) untuk memberikan permodalan bagi nelayan (nelayan pencari ikan), hal ini diharapkan dapat merubah variasi pembagian pendapatan, terkait dalam sistem bagi hasil nelayan Karangsong yang terjadi antara nelayan dan juragan.</p>
19	<p>Fatchiya dan Muflikhati, 2006 “ Peran KUD Mina Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir (Kasus Di KUD Mina Fajar Sidik Di Blanakan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat)”</p>	<p>Tujuan : Mengethui keragaan KUD Mina Fajar Sidik sebagai suatu organisasi yang bersifat ekonomi maupun sosial Apa saja Peran KUD Mina Fajar Sidik Dalam pembnagunana masyarakat pesisir dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUD Mina Fajar Sidik baik internal maupun eksternal serta cara strategi yang tepat untuk pembegunan lebih lanjut</p> <p>Metode Penelitian Studi kasus dengan pengambilan data melalui wawancara dan obseravis dan analisa data menggunakan Analisis SWOT</p>	<ul style="list-style-type: none"> · KUD Mina Fajar Sidik Telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi · Peran KUD Mina Fajar Sidik dalam pembenguna ekonomi cukup besar baik secara ekonomi maupun sosial. · Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUD Mina Fajar Sidik yang bersifat internal adalah menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kegiatan usahanya namun kelemahannya adalah banyak kondisi SDM anggota yang masih rendah. Peluang yang dimanfaatkan KUD Mina Fajar Sidik yang utama adalah presepsi masyarakat dan kepedulian pemerintah yang cukup baik, sedang ancamanya berupa kondisi iklim yang tidak bersahabat dan perairan yang over fishing.

20	Sulistiyani Dyah P(2006) “ Analisis Efisiensi TPI kelas 1,2,3 di Jawa Tengah dan pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Karyawan”	Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menganalisis efisiensi TPI Kelas 1, 2 dan 3 di Jawa Tengah. 2. Mengkaji kemungkinan pengembangan TPI untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif pengumpulan data menggunakan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 (sembilan) TPI telah mencapai skor yang efisien, hanya TPI PPSC yang belum efisien.sedang TPI PPSC belum efisien sehingga perlu diadakan pengurangan pada input atau output TPI tersebut.
----	---	---	--

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu, diolah

2.3 Kerangka Konseptual

Nelayan atau buruh nelayan merupakan mata pencaharian yang mendominasi masyarakat pesisir saat ini. Kehidupan yang berjibaku dengan ombak dan angin dalam mencari penghasilan yang belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Masih rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan menyebabkan nelayan memiliki keterbatasan wilayah yang dapat dijangkaunya, terutama ketika musim angin atau ombak terjadi. Pada musim-musim tertentu, nelayan bahkan tidak dapat melaut karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan mengancam keselamatan jiwanya. Di lain sisi, kondisi perairan yang *over fishing* (kelebihan tangkap) menyebabkan hasil tangkapan nelayan semakin menurun. *Over fishing* terjadi karena kondisi perairan yang tidak mendukung bagi kehidupan ikan seperti tidak terdapatnya rumah ikan di wilayah perairan, baik terumbu karang ataupun rumah ikan buatan, dan juga wilayah hutan mangrove yang mulai menghilang. Perairan yang tidak mendukung kehidupan ikan menyebabkan ikan berpindah dan mencari lokasi lain yang lebih mendukung kehidupannya.

Pengaruh musim ikan dan angin turut berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Pada musim ini (paceklik), nelayan praktis tidak mendapatkan penghasilan. Pada musim paceklik, nelayan membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kehidupan keluarganya sehingga hal ini mendorong nelayan untuk meminjam kepada juragan darat atau pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dapat menjadi penyedia kebutuhan modal untuk biaya hidup, lembaga keuangan informal juga dapat menyediakan modal bagi nelayan untuk bekerja seperti menyediakan modal untuk perbaikan perahu ataupun pembelian alat tangkap. Kenyataan ini semakin memperparah ketergantungan nelayan terhadap juragan atau rentenir yang memberikan pinjaman kepada nelayan.

Selain kondisi musim, yang menjadi permasalahan nelayan adalah fluktuasi harga ikan yang tak dapat dikendalikan. Nelayan tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk menentukan harga ikan di pasar input ataupun pasar output. Pada lain sisi, karakteristik produk perikanan yang mudah rusak

menyebabkan nelayan pada akhirnya tidak memiliki pilihan selain menjual hasil tangkapannya dengan harga yang mengikuti pasar. Selain itu, ketidakmampuan nelayan mengolah hasil tangkapannya menyebabkan nelayan tidak mendapatkan nilai tambah dari produk tangkapan. Nilai tambah akan diperoleh apabila nelayan melakukan pengolahan terhadap hasil tangkapan menjadi produk baru seperti pengolahan ikan menjadi beberapa olahan yaitu nugget, bakso, abon, krupuk dan lain-lain.

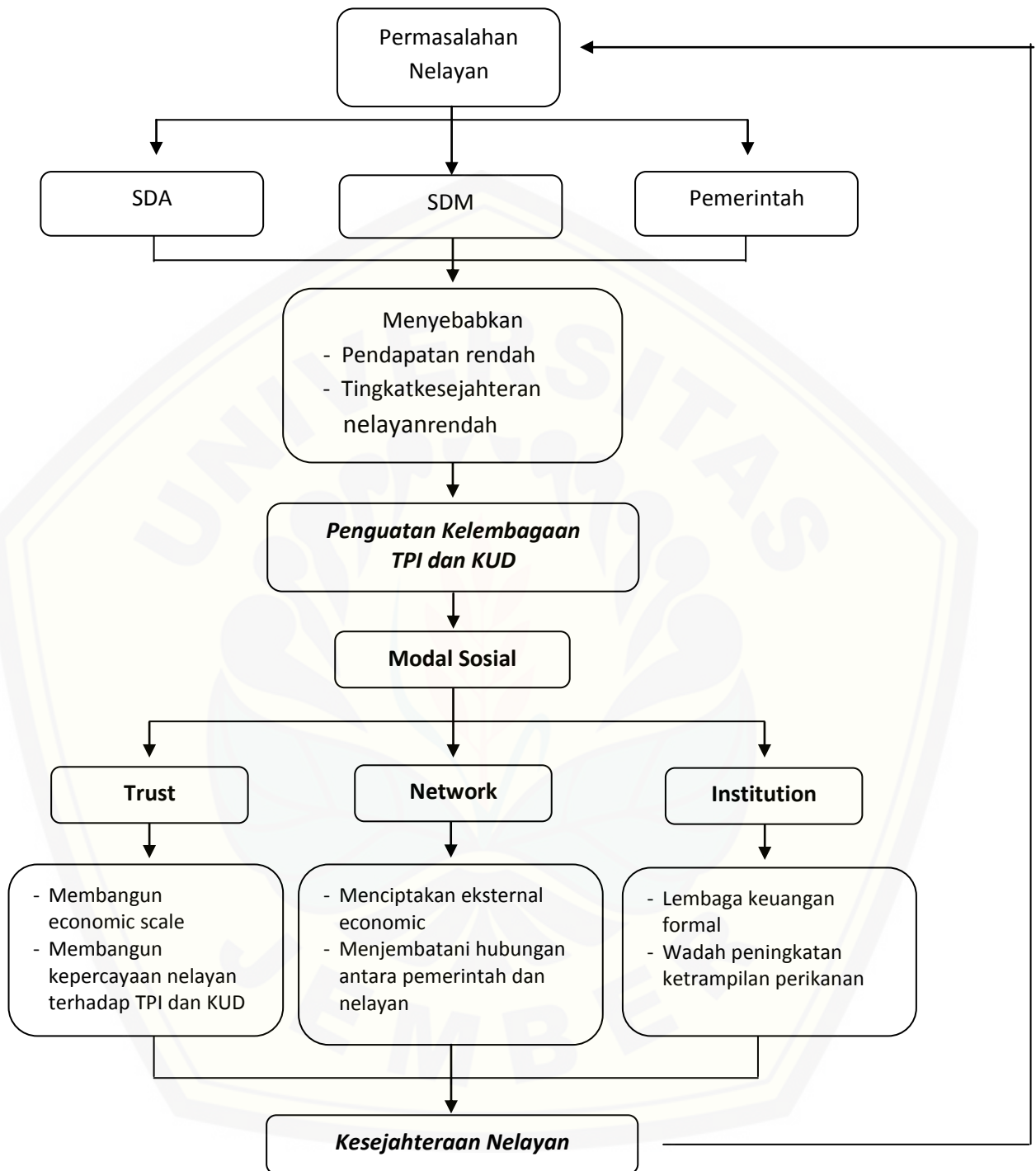
Pendapatan nelayan yang tidak menentu (*unpredictable*) mengharuskan nelayan memiliki strategi nafkah untuk meningkatkan pendapatannya. Strategi nafkah yang dapat dilakukan nelayan misalnya dengan meningkatkan teknologi penangkapan ikan, diversifikasi usaha perikanan dan diversifikasi usaha diluar sektor perikanan. Namun, faktor ketidak mampuan akses teknologi serta keterbatasan pendidikan dan kemampuan nelayan sering menjadi kendala bagi pelaksanaan strategi nafkah tersebut. Pada umumnya, nelayan/buruh nelayan tidak memiliki keahlian lain diluar aktivitasnya melaut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi nelayan menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan semakin terpuruk. Pada aras ini, nelayan membutuhkan sebuah lembaga/pengelola yang dapat menjadi pengontrol harga sehingga memberikan posisi tawar bagi nelayan untuk dapat menaikkan harga di pasar input dan output. Selain itu, keberadaan lembaga tersebut harus memberikan peluang dan kesempatan nelayan untuk lebih berkembang dan lebih sejahtera, misalnya melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penampungan hasil tangkapan dan membuka akses kerjasama atau kemitraan dengan pihak luar untuk membuka peluang pemasaran ataupun peluang usaha bagi nelayan. Selain itu, KUD diharapkan mampu menyediakan modal bagi kebutuhan nelayan dan sebagai penyedia uang cash pada saat terjadi musim paceklik. Fungsi dan peran ini sejatinya merupakan fungsi dan peran yang diharapkan nelayan terhadap KUD sebagai lembaga pengelola TPI.

KUD dan TPI merupakan sebuah lembaga ekonomi yang paling dekat dengan nelayan. Sebagai lembaga ekonomi, KUD dan TPI memiliki sebuah aturan main (*rule of the game*) yang mengatur pelaku-pelaku ekonomi untuk mencapai

sebuah tujuan ekonomi. Dalam hal ini, modal sosial merupakan bagian penting yang berperan sebagai pengikat struktur sosial agar institusi (*rule of the game*) dapat berjalan. Modal sosial yang banyak berperan dalam transaksi ekonomi pada KUD dan TPI adalah jaringan (*networking*) dan kepercayaan (*trust*). Jaringan merupakan modal sosial yang dibutuhkan KUD dan TPI untuk menciptakan *external economics* sehingga membuka peluang bagi produk penangkapan dipasarkan ke area yang lebih luas. Perluasan pemasaran secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nelayan sehingga kesejahteraan nelayan dapat meningkat. Pada sisi lain, kepercayaan (*trust*) merupakan modal sosial yang harus dibangun antara nelayan dengan KUD sebagai pengelola TPI sehingga nelayan mempercayakan hasil tangkapannya untuk ditimbang dan dikelola di TPI. Selain itu, kepercayaan yang terbangun dapat membangun *economics scale* sehingga nelayan memiliki posisi tawar dalam menentukan harga di pasar output dan input. *Trust* yang diberikan kepada KUD menjadi pnghubung komunikasi antara nelayan dengan pemerintah, sehingga KUD sebagai lembaga ekonomi yang paling dekat dengan nelayan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait permasalahan yang dihadapi oleh nelayan untuk dicarikan solusinya.

Sehingga menjadi penting untuk mengetahui penguatan kelembagaan KUD dan TPI melalui studi modal sosial (*institusi, networking dan trust*) agar kelembagaan TPI dan KUD dapat berperan sebagaimana yang diharapkan oleh nelayan. Penguatan KUD dan TPI dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan nelayan dan meningkatkan pendapatan nelayan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3. Metode Penelitian

Pada Bab 3 ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 terdiri dari 7 subbab yang meliputi: tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, penentuan informan, disain penelitian, metode analisa data, definisi operasional dan batasan penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai aturan main (*rules of the game*) KUD Mina dalam pengelolaan TPI. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran secara *holistic* kelembagaan KUD Mina serta hubungan dan interaksinya dengan nelayan, sehingga akan diperoleh informasi yang cukup dan lengkap untuk menunjukkan kelembagaan KUD Mina di Kabupaten Situbondo.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada TPI dan KUD di Kabupaten Situbondo. Terdapat delapan TPI yang dikelola oleh KUD yang tersebar di Kecamatan Jangkar, Banyuputih, Suboh, Kapongan dan Panarukan. Dari ke delapan lokasi TPI yang dikelola KUD tersebut memiliki kondisi yang relatif sama dari segi kegiatan yang dilakukan sehingga dipilih dua sampel TPI dan KUD yang diteliti yaitu TPI dan KUD di Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Banyuputih. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh dari pelaku yang terlibat pada pengelolaan TPI dan KUD yang ada di Kabupaten Situbondo serta dari nelayan setempat. Pengambilan data primer dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara peneliti bertatap muka secara langsung dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan terkait tema penelitian yang kemudian dikelola menjadi pertanyaan terbuka untuk disampaikan kepada informan. Sehingga untuk setiap informan diajukan beberapa pertanyaan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dan berulang kali hingga didapat informasi yang jenuh dan tidak ada lagi informasi baru.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi terkait peran KUD dalam pengelolaan TPI serta perannya dalam meningkatkan pendapatan nelayan daerah setempat. Pewawancara telah mengenal secara baik dengan para informan sehingga diharapkan informasi yang diberikan merupakan informasi sebenarnya yang terjadi dilapangan.

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

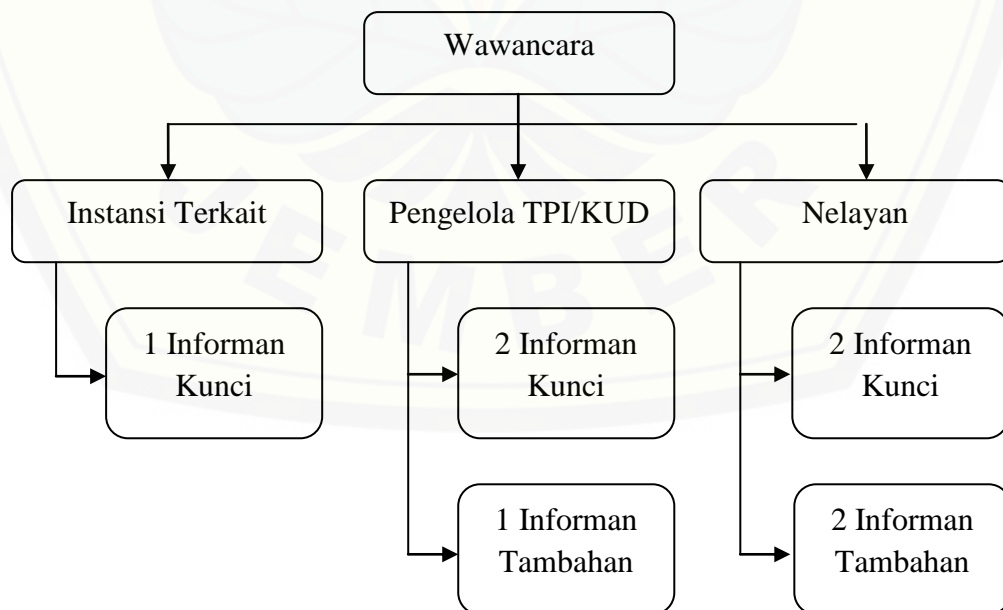
FGD merupakan metode pada penelitian kualitatif yang sangat populer karena relatif lebih cepat dan lebih murah. Tujuan pelaksanaan FGD adalah untuk menjawab tujuan penelitian poin ke 3 yaitu strategi dan disain kelembagaan KUD dan TPI meningkatkan pendapatan nelayan. Dengan FGD diharapkan dapat tergali informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan sudut pandang dari peserta diskusi mengenai tema terkait. Peserta FGD terdiri dari stakeholder terkait serta nelayan yang terdiri dari minimal 6 s/d 12 orang audien. Menurut Bungin (2003:18) menjelaskan bahwa terdapat dua tahapan pelaksanaan FGD yaitu tahap diskusi dan tahap analisis. Pada tahap diskusi melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini, pelaksanaan FGD dilakukan dua tahapan yaitu tahap 1, FGD dilakukan oleh beberapa nelayan dan tahap 2 FGD dilakukan oleh pengelola TPI dan KUD serta Instansi terkait. Pemisahan antara nelayan dan pengelola TPI dan KUD serta Instansi terkait dilakukan untuk menghindari informasi yang ditutupi oleh nelayan ataupun dari pengelola TPI dan KUD. Pada tahap analisis terdiri dari analisis makro dan analisis mikro. Pada tahap analisis mikro peneliti membuat gambaran dengan

cara merangkaikan hasil diskusi dengan fokus penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan analisis dengan lebih mendalam untuk mendapatkan analisis secara makro.

3.4 Pemilihan Informan

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *snow balling sampling*. *Snow balling sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, selanjutnya penelusuran akan berkembang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kunci. Informan lanjutan ini disebut informan tambahan. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel. (Subagyo,2006).

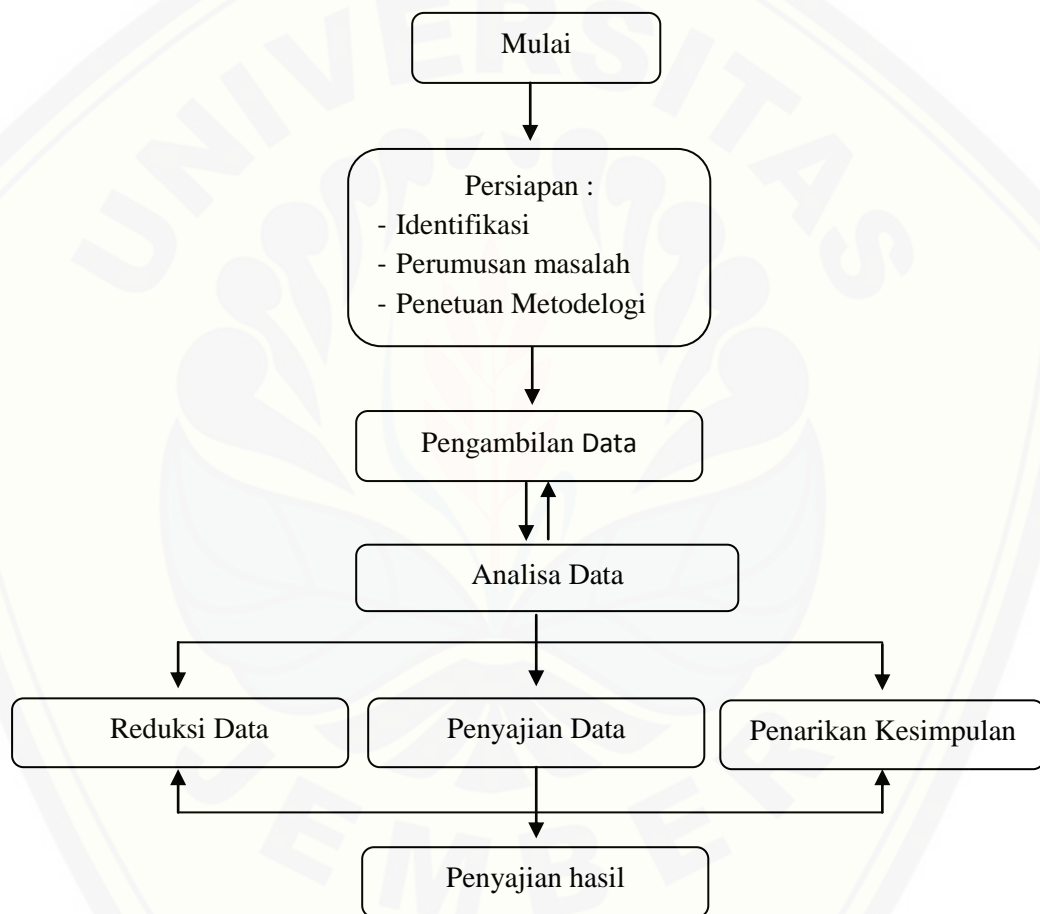
Pada penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah tokoh nelayan yang dianggap mewakili, pengelola KUD, dan Instansi terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Informan kunci dibatasi kepada lima informan, kemudian dilanjutkan pada informan tambahan sesuai kebutuhan penelitian. Berikut akan disajikan Gambar 3.1 terkait tahapan penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini:



Gambar 3.1 Langkah-langkah Penentuan Informan

3.5 Disain Penelitian

Langkah-langkah penelitian meliputi persiapan penelitian, pengambilan data, analisa data dan penyajian data. Persiapan penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah TPI dan KUD di Kabupaten Situbondo, kemudian peneliti melakukan observasi/pengamatan untuk melihat permasalahan dan membuat rumusan masalahnya. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini:



Gambar 3.2 Disain Penelitian

3.6 Metode Analisa Data

Pada penelitian kualitatif, pencarian data bersifat menyeluruh dan merupakan rangkaian kata yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, 1992, proses analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data bisa berupa matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang terpadu dan mudah dipahami. Metode penyajian data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menyusun data-data dan informasi yang diperoleh dilapangan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan dicarikan solusi/pemecahan masalahnya. Data-data dan informasi dikelompokkan sesuai dengan tema dan fokus penelitian, kemudian di bandingkan dengan teori empiris dan literature-literatur yang terkait tema dan fokus penelitian.

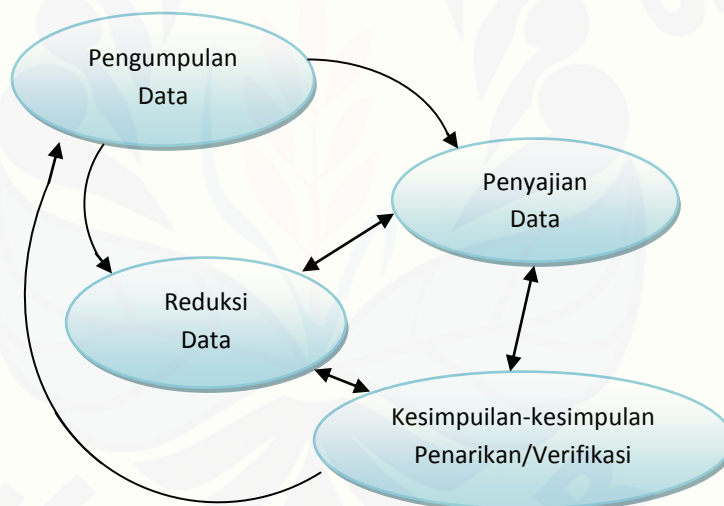
Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut yang dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak

diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

Analisis data menurut Miles dan Huberman ini dapat digambarkan dalam bagan seperti gambar di bawah ini :



Sumber : Miles dan Huberman, 1992

Gambar 3.3 Komponen-komponen Analisis Data, Metode Interaktif

Data yang diperoleh akan diuji keabsahan dan kevalidannya dengan metode triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi dengan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan pengamatan dilapangan, membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan yang lain yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Triangulasi waktu dilakukan dengan

melakukan wawancara secara berulang sehingga didapatkan jawaban yang memuaskan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang jujur dari informan. Sedangkan triangulasi dengan teori dilakukan dengan membandingkan antara tema atau penjelasan dari analisis pola, hubungan yang muncul dalam penelitian dengan teori yang ada (Moleong, 2009:330-332). Metode triangulasi digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sebuah tempat dilakukannya pendaratan ikan yang terdapat dikawasan nelayan dimana terjadi aktivitas ekonomi seperti aktivitas penimbangan, penarikan retribusi penimbangan serta transaksi antara nelayan dengan pedagang/pengepul ikan. TPI yang menjadi obyek dalam penelitian ini hanya pada TPI yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga (dalam hal ini dilakukan oleh KUD).
2. Ekonomi Kelembagaan TPI didefinisikan sebagai aturan main (*rules of the game*), norma dan tatanan yang disepakati dalam tata kelola pelaksanaan TPI yang dilakukan oleh KUD nelayan. Aturan atau norma yang terdapat didalamnya dapat berupa aturan tertulis atau tidak tertulis yang menjadi pedoman bagi nelayan ataupun pengelola TPI dalam melakukan aktivitas ekonominya.
3. Dinamika Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima nelayan dari waktu ke waktu. Dinamika pendapatan dapat terjadi akibat perubahan musim ataupun tata cara dalam penjualan ikan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus pengamatan adalah perubahan pendapatan yang disebabkan oleh perubahan metode penjualan dan penimbangan ikan dengan cara membandingkan pendapatan nelayan yang melakukan penimbangan ikan di TPI dengan diluar TPI (Pengambek Blantik).
4. Modal Sosial merupakan aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu yang memungkinkan terjadinya sebuah struktur sosial baru yang dapat

membentuk sebuah hubungan (*connection*) dan kepercayaan (*trust*). Modal sosial yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah adanya hubungan dan kepercayaan antara nelayan dengan pengelola TPI dan KUD, serta antara nelayan dengan *pengambek blantik*.

3.8 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan pengambilan lokasi penelitian yang menjadi sampel adalah pada TPI Pandean dan TPI Jangkar. Lokasi penelitian merupakan lokasi TPI yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga (KUD nelayan) dan merupakan TPI dengan nilai target retribusi tertinggi dan rentan konflik.

Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisa ekonomi kelembagaan (*rules of the game*) yang menjadi pedoman bagi nelayan, pengelola TPI dan pengambek blantik dalam melakukan aktivitas ekonomi di TPI. Dinamika pendapatan yang diamati adalah perubahan pendapatan yang disebabkan oleh perubahan aktivitas penimbangan di TPI yang beralih pada pengambek blantik dan membandingkannya dengan nelayan yang masih melakukan penimbangan di TPI.

BAB 5. PENUTUP

Bab 5 terdiri dari subbab 5.1 dan subbab 5.2. Pada subbab 5.1 akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dengan cara menjawab tiga pertanyaan empiris yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan pada subbab 5.2, akan dijabarkan mengenai saran terkait hasil penelitian baik bagi pemangku kebijakan ataupun bagi akademisi yang lain.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tema dan fokus penelitian, maka dapat disimpulkan mengenai beberapa hal berikut ini:

1. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, pola kelembagaan KUD Mina di bentuk oleh modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan norma (*norm*). Kelembagaan KUD meliputi aturan main dalam pengelolaan TPI, pemungutan retribusi beserta pengelolaan retribusinya, sistem kepengurusan KUD dan TPI serta hubungan antara nelayan dan KUD. Menurunnya tingkat kepercayaan nelayan terhadap KUD telah mendorong lahirnya lembaga informal yang menggantikan peran KUD yaitu KUD tandingan, pengambe' dan *blantik*. keberadaan pengambe', blantik dan KUD tandingan telah menjadi solusi bagi nelayan untuk menggantikan peran KUD Mina baik dalam proses penimbangan hasil tangkapan, penjualan hasil tangkapan ataupun sebagai penyedia pinjaman modal.
2. Beberapa faktor kendala dalam pengembangan KUD Mina dapat dianalisa dari faktor lingkungan eksternal dan internal. Faktor kendala tersebut antara lain:
 - a. Faktor Internal, yaitu:
 1. SDM Pengurus yang rendah
 2. Tidak adanya program kerja KUD
 3. Pemilihan ketua dan pengurus tidak sesuai AD/ART
 4. Keanggotaan KUD tidak jelas
 5. Kepercayaan nelayan menurun

- b. Faktor Eksternal, yaitu:
 1. Tidak ada sanksi bagi penimbang diluar TPI
 2. Keberadaan KUD tandingan, pengambe' dan *blantik*
 3. Pengawasan dan pembinaan yang kurang dari instansi terkait
3. Berdasarkan hasil analisa faktor penghambat dalam pengembangan KUD Mina serta hasil temuan empiris tentang pola kelembagaan KUD maka dapat dirumuskan disain kelembagaan KUD Mina sebagai berikut:
 - a. Penguatan modal sosial
 - b. Bermitra dengan pengambe' dan *blantik*
 - c. Reformasi kepengurusan KUD dan TPI
 - d. Transparansi pengelolaan retribusi TPI
 - e. Penyusunan program kerja KUD
 - f. Meningkatkan partisipasi nelayan anggota dalam kepengurusan KUD
 - g. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak luar

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap fokus dan tema penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa saran, antara lain:

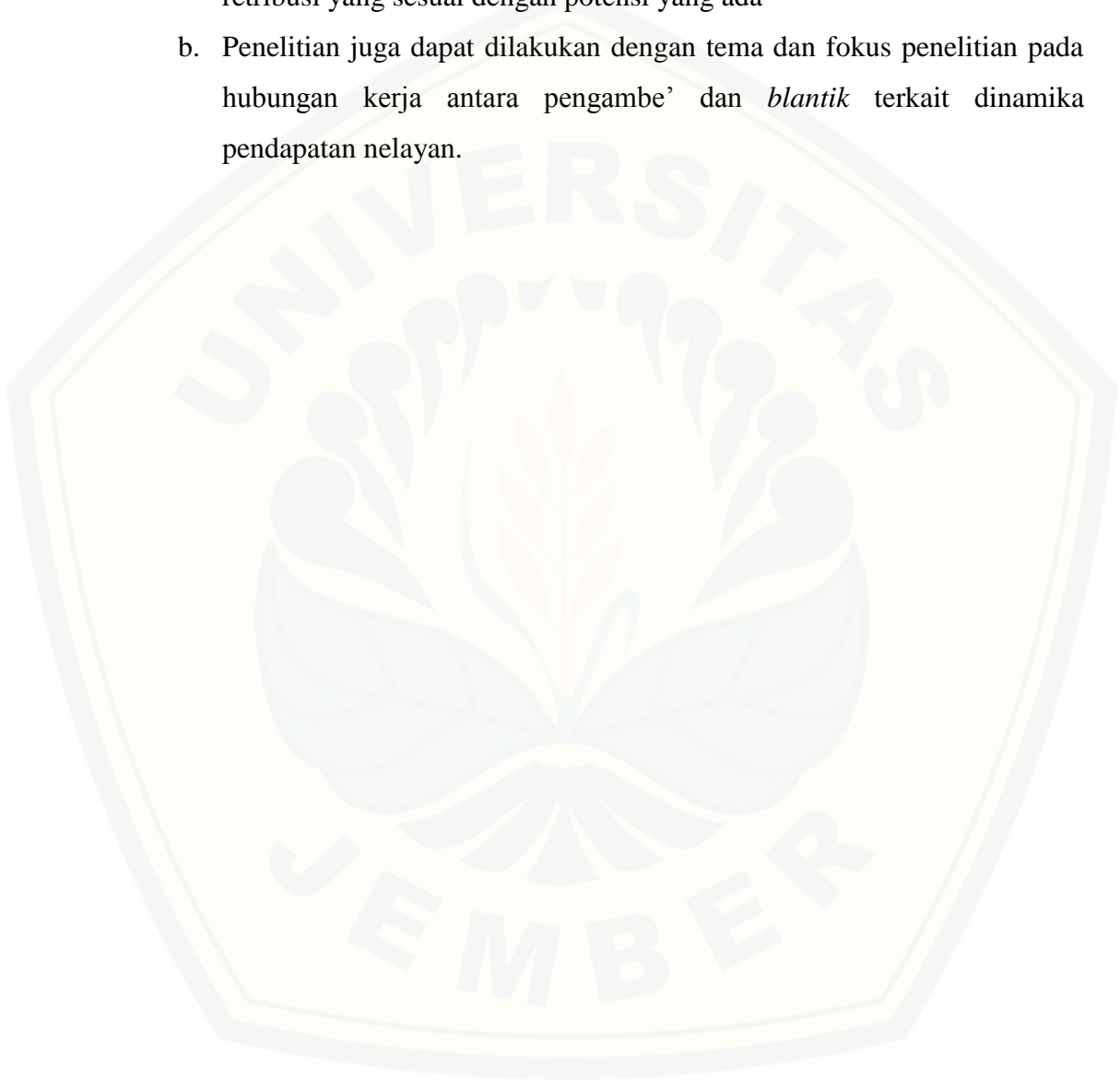
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo:

Dalam pengelolaan retribusi TPI terdapat beberapa upaya perbaikan terkait pengelolaan TPI, yaitu:

 - a. Perlu adanya sistem penetapan target yang lebih baik dan akurat sesuai potensi dengan cara menganalisa terlebih dahulu potensi retribusi TPI, sehingga penetapan target dapat mengoptimalkan potensi yang ada.
 - b. Perlu adanya sistem pengawasan terhadap pemungutan retribusi untuk menghindari *moral hazard* dari pengelola TPI dengan cara memberikan kartu anggota TPI kepada nelayan yang melakukan timbangan di TPI kemudian mencatat setiap timbangan yang dilakukan di TPI (jumlah tangkapan (ton) serta jumlah retribusinya kemudian mendorong KUD memberikan laporan pertanggung jawaban perolehan retribusi serta pemanfaatannya kepada anggota KUD Mina setiap triwulan.

- c. Perbaiki metode pemilihan ketua dan pengurus KUD yang akan mengelola TPI, agar pemilihannya lebih terbuka dan tidak diskriminatif. Pemilihan pengurus KUD sebaiknya dilakukan melalui rapat anggota dengan mengundang semua anggota KUD serta tokoh masyarakat setempat, untuk mengadakan musyawarah pemilihan ketua dan pengurus KUD.
 - d. Memberikan pembinaan secara kontinu kepada KUD Mina selaku pengelola TPI baik dalam hal teknis pelaksanaan administrasi KUD dan TPI ataupun sistem kelembagaannya.
 - e. Memberikan pembinaan bagi KUD Mina dalam melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang baik seperti membina KUD untuk dapat melakukan rapat anggota tahunan (RAT), memberikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota, menjalin kemitraan dengan pihak luar serta membantu KUD untuk dapat melakukan sistem simpan pinjam.
2. Bagi KUD Mina:
- a. Menerapkan prinsip-prinsip berorganisasi dengan baik, seperti melakukan penyusunan AD/ART dan program kerja KUD, melaksanakan AD/ART dan program kerja serta melaksanakan RAT.
 - b. Mengadopsi kelembagaan informal yang sudah melekat dimasyarakat seperti menerapkan norma yang ada pada pangambe' dalam hal pelaksanaan sistem simpan pinjamnya.
 - c. Mendata kembali anggota KUD Mina agar terdapat kejelasan jumlah anggota
 - d. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap KUD dengan cara mereformasi kepengurusan KUD dan melaksanakan pemilihan ketua dan pengurus melalui pemilihan dalam musyawarah anggota, menerapkan transparansi pengelolaan aset, serta transparansi dalam pengelolaan retribusi TPI.

3. Bagi akademisi atau peneliti lain:
 - a. Penelitian dapat dilakukan dengan tema dan fokus penelitian yang sama, dengan menganalisis secara mendalam ketidakmauan nelayan untuk melakukan penimbangan ikan di TPI serta menghitung penetapan target retribusi yang sesuai dengan potensi yang ada
 - b. Penelitian juga dapat dilakukan dengan tema dan fokus penelitian pada hubungan kerja antara pengambe' dan *blantik* terkait dinamika pendapatan nelayan.



DAFTAR BACAAN

Buku

Agunggunanto, Yusuf E. 2011. Analisa Kemiskinan dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus di Kecamatan Wedung Kab.Demak Jawa Tengah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 1. No.1 Hlm. 50-558*

Alimuddin, M. Ridwan, 2005, *Orang Mandar Orang Laut: Kebudayaan bahari Mandar Mengaruni Gelombang Perubahan zaman*, Jakarta: KPG bekerjasama dengan yayasan Adikarya IKAPI

Altman, Irwin, et.all, (ed), 1980, *Human Behavior and Environment Advances in Theory and Research*, New York an London: Plenum Press.

Arsyad,Lincolin.2010. *Ekonomi Pembangunan .Edisi Kelima*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Bardhan, Pranab.1989. *Alternative Approaches to The Theory of Institutions in economic Development*. Clarendon Press. Oxford

[Bannock, Graham](#), R. E. Baxter dan Evan Davis. 2004. *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books Ltd

Coleman, James.S, (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital.*The American Journal of Sociology, Vol. 95 Supplement: 195-S120*,

Common, John R. 193.1.Institutional Economics. *Amerivcan Econimic Review.Vol. 21, Issue 4, December : 648-657*

Dahuri, Rokhmin, dkk, 2004, *Budaya Bahari: Sebuah Apresiasi di Cirebon*, Jakarta:PerumPercetakan Negara RI.

Dahuri, R., Rais J., Ginting S.P., Sitepu, M.J. (cet. 2), 2001 :*Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*; PT. PradnyaParamita, Jakarta, Indonesia

Dirjen Kebudayaan Depdikbud, 1997, *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Timur*, Jakarta: CV BuparaNugraha

Fatchiya, Anna dan Muflikhati, I. 2006.Peran KUD Mina dalam Pembangunan Masyarakat pesisir.(Kasus di KUD Mina Fajar Sidik di Blanakan, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat),*Buletin Ekonomi Perikanan.Vol. VI.No.3 Hal.50-58*.

- Hakim, L. 2009. *Nelayan Dalam Ketidakpastian. Nelayan di Tengah Pusaran Kemiskinan dan Ketidakpastian*. Dream
- Hayami, Y dan M. Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa .Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelambagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Hendrik.2013. Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) KEC.Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Terubuk*. Vol. 41 NO.1 halm.102-108.
- Harrison, Mark. 1975. Chayanov and The Economics of The Russian Peasantry. *Journal of Peasant Studies* 2: 4 (1975) , pp. 389-417
- Imron, Ali. 2012. Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Tangun harjo Tugu semarang dalam menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal Riptek*. Vol. 6.No. 1.Hlm. 1-12.
- Indarti I dan Wardana Surya D. 2013. Metode pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir kota Semarang. *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 17 No. 1, Juni 2013 hal. 75-88
- Irawan, Irma F, 2013. Analisis Efisiensi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Provinsi Banten dan Pengembangannya untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. *Tesis.Universitas Pajajaran. Bandung*
- JokoSubagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kasper, Wolfgang dan Manfred E. Sterit . 1998. *Institutional Economics : Social Order and Public Policy*. Edward Elgar. Aldershot (UK) and Vermont (USA)
- Kohlbacher, Florian. 2006. The Use Qualitative Content Analysis in Case Study Research. *FQS Volume 7, No.1, Art.21 – January 2006*.
- Kuncoro, M. 1990. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP-AMP, YKPN
- Kusnadi, 2002, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta: LkiS
- _____. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Libecap, G. 1989. Distributional Issues in Contracting for Property Rights. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*.Vol. 145.

- Lubis E, dkk. 2012. Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan ratu ErnaniLubis, Anwar Bey Pane, Retno Muningsgar, dan Asep Hamzah. *Maspari Journal. Volume 4 No.2 halm.159-167.*
- Mahyudin, B. 2001. Perana Tempat Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Kasus Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu) Makalah Falsafah Sains (PPs 702). *Program Pasca Sarjana / S3. Institut Pertanian Bogor*
- Melani, Retna W, dkk. 2009. Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjungungat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang). *Pusat Penelitian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Universitas Maritim Raja Ali Haji (PPSPL UMRAH).*
- Miles, M.B & Huberman. , A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods.* California: Sage
- Moleong, Lexy. J. 1994. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosda karya. Bandung
- Mubyarto, Dkk, *Nelayan dan Kemiskinan,* Yayasan Agri Ekonomika
- Mayring, Philipp. 2000. Qualitative Content Analysis. *FGS, Volume 1, No.2 – June 2000*
- North, D. C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economics Performance.* Cambridge University Press.
- 1994. *Economics Performance Through Time. The American Economic Review. Vol84., Issue 3, June : 359-368*
- North, Gary. 1992. *The Coase Theorem: Study in Economic Epistemology.* Institute of Christian economics. Texas
- Omat. 2008. Implikasi Keberadaan PPI Terhadap Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Perikanan (Studi Kasus: PPI Karangsong Kecamatan Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang*
- Ostrom, E. (1990). *Governing of the common. The Evolution of Institutions for Collective Action.* Cambridge University Press.

- Pramitasari ,Dyah S. 2006. Analisis Efisiensi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1, 2 dan 3 di Jawa Tengah dan Pengembangannya untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. *Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang*
- Risharyanto, Budi A. 2006. Efisiensi dan Peningkatan Kinerja TPI. *Tesis, MM UNDIP*
- Rutherford, Malcolm. 1994. *Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism*. Cambridge University Press. United Kingdom
- Schmid, A. 1972. The Economic Theory of Social Institution. *American Journal of Agricultural Economics*. 54:893-901
- Schotter, A. (1981). *The Economic Theory of Social Institutions*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Setiarso, O, dkk. 2010. Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan dan strategi Pemberdayaan Pengelola Tempat Pengelolaan Ikan di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Eko-Regional Vol. 5 No. 1*
- Soero, Pratama H, dkk. 2009. Pemberdayaan Istri Nelayan Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada KUD Mina Jaya Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. No.1 Hal. 41-46*
- Sadono Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Sajogyo, 2002. *Bunga Rampai Perekeonomian Desa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Salim, E. 2000. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: YayasanIdayu
- Sipahelut, M. 2010. Analisa Pemberdayaan Masurakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor*
- Sudaryanto, B. 2003. Analisis Efisiensi Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dengan Data Envelopment Analysis (Dea): Studi Di Kabupaten Pati Dan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Fakultas ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang*
- Sumardi, Muldjanto. 1982. *Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*. CV. Rajawali. Jakarta

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto. (2003). Kajian Model Pember-dayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur. Surabaya: Lemlit Unai rdengan Balitbang Propinsi Jatim
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Utomo, Pamarto S. 1991. Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Stabilitas dan Pembentukan Harga Ikan Laut Hasil Tangkapan Nelayan di Kotamadya Manado dan Bitung. *Research Report from JBTUNIKOMPP*
- Yeager, Tomoty J. 1999. *Institutions, Transition Economies and Economic Development*. Political Economy of Global Interdependence. Oxford
- Yulistiyono, H.2008. Evaluasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bangkalan. *Universitas Unijoyo. Bangkalan*
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma Teori dan Kebijakan*. Erlangga. Jakarta
- Wijaya L dan Ihsannudin.2013. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agroekonomi Vol2 No.2*
- Internet
- Anonymous, 2012. *Modal sosial dan Pemberdayaan Komunitasnelayan* <https://akhfa14.wordpress.com/2012/01/31/modal-sosial-dan-pemberdayaan-komunitas-nelayan/>. (Diakses 7 Juni 2015)
- Anwar, Khairil. 2011. Pendapatan .Masyarakat <http://khairilsemsi.blogspot.com/2011/12/pendapatan-masyarakat.html> (Diakses 1 Februari 2013 07.00 WIB)
- Chronographer, Ekhardhi. 2010. Pendapatan, Biaya, dan Usaha Kecil. <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil.html>.(Diakses 1 Februari 2013 07.30 WIB)
- Hertanto, S, dkk. 2013. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempatpelelangan Ikan di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* <http://www.fisipundip.ac.id> (Diaksestgl 10 Februari 2015)

Vatn.Arild. 2006. *Institutions*. Departement of Economic and Resource Management Norwegian University of Life Science. [http://www.Ecoeco.org/pdf/Institutins Aril d Vatn.pdf](http://www.Ecoeco.org/pdf/Institutins%20Aril%20d%20Vatn.pdf) [diakses tgl 4 Desember 2014]

....., 2013 <http://toekyk.blogspot.com/2013/09/pentingnya-pelelangan-ikan-dari-segi.html>



LAMPIRAN A. HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. Informan : Bapak Ed, nelayan, pernah menjadi pengurus KUD pada tahun 2010

Peneliti : Assalamu'alaikum pak gimana kabarnya

Informan : Alhamdulillah baik bu

Peneliti : Bagaimana kondisi nelayan jangkar pak untuk saat ini

Informan : Masih seperti yang dulu bu, dak ada perkembangan sama sekali .

Peneliti : Kalo KUD gimana pak, saya liat Kantor KUDnya sepi plangx sudah ndak ada, Cuma TPInya saja yang agak rame itupun sepertinya dak serame seperti dulu.

Informan : KUD cuma nama aja bu, sebenarnya sudah dak ada KUD, pengurusnya dak jelas, itu cuma jadi usahanya keluarganya h. Agus. Semua yang ngurus timbangan semuakan keluarganya. Kemaren saja itu waktu ijin KUD mau dicabut diadakan pertemuan. Itupun disamarkan. Diundangan ditulisnya pertemuan nelayan tetapi setelah nyampe sana ternyata isinya RAT. Jadi intinya hanya untuk dapat tanda tangan nelayan saja. Sebenarnya masyarakat sendiri sudah dak ada kepercayaan sama sekali terhadap pengurus KUD, Cuma mau usul dak berani bu. La wong dari dinas sendiri dak tegas. Apalagi mainnya kekerasan bu, Dulu jamannya saya masih ada iwan saya sama teman teman rencananya mau me RAT KUD, tapi kita hampir mau dibunuh. Rencananya kalo ada RAT kita mau nanya pertanggungjawaban KUD bu, kan banyak usahanya KUD bu, mana dari hasil retribusi penimbangan, sewa gudang es, karcis untuk pedagang di sana , tapi mana bu. Semua hasilnya Cuma diambil sendiri sama pengurus. Itu kalo habes nimbang langsung dibagi-bagi sudah selesai

Peneliti : Apa kondisi seperti ini memang sejak dulu sudah terjadi sejak didirikannya KUD pak

Informan : O ndak bu, kalo dulu se jaman saya masih kecil dak seperti itu bu, dulu di TPI masih ada lelang, semua nelayan dan pedagang ngumpulnya di sana. Ada simpan pinjam dan juga tiap tahunnya nelayan dapat pembagian hasil bu.

Peneliti : Tahun berapa KUD Mina Harta Jangkar ini berdiri pak.

Informan : Kira kira tahun 1980an bu, itu se jamannya bapak saya jadi nelayan. Saya masih kecil bu.

Peneliti : Mungkin bapak pernah tau latar belakang didirikannya koperasi nelayan ini pak

Informan : Ya memang karena jaman itukan sedang maraknya koperasibu, kalo dak salah bapak koperasi waktu itukan p. Suharto bu. Dulu elok sekali bu, ada ampraan istilahnya tu bu. Lelang juga berjalan di TPI, Pedagang juga dak banyak seperti sekarang, Cuma ada

- beberapa orang seperti P. H. Naji, H, Syukron, H. Latifa. Kalo sekarang banyak bu, semua pengen meniru. sekarang ini saja bu yang kacau, artinya seperti nelayan juga sudah tidak bisa ditertibkan karena faktor ketidakpercayaan pada KUD. KUD hanya mau ambil jasa timbangan tapi dak mau ngapa-ngapain
- Peneliti : Kepercayaan nelayan terhadap KUD mulai hilang sejak kapan pak
- Informan : Itu sejak jamannya H. Agus menjabat ketua. Kalo dak salah sudah 3 periode , tapi seklaipun dak pernah RAT.
- Peneliti : Bapak kan juga pernah menjadi pengurus koperasi pak, itu kapan pak .
- Informan : Itu masih jamnnya junaedi, jadi ketuanya junaedi saya sekretaris. Saya sengaja mengundurkan diri karena dak sesuai dengan keinginan saya. KUD maunya menyamakan harga. Disamping KUD dia juga pedagang.
- Peneliti : Maksudnya disamakan gimana pak
- Informan : Jadi misalkan ikan kakap merah dulukan banyak. Jadi maunya kud yang mennentukann harga KUD , Jadi harga kakap merah tidak bolehh lebih dari sekian, kan nelayan yang dirugikan. Namanya pedagang maunya dia mau ambil untung yang banyak sementara nelayan ingin harga yang setinggi-tingginya. Tapi justru KUD lebih membela kepada pedagang daripada nelayan. Akhirnya saya berhenti dah.
- Peneliti : Kalo keanggotaan KUD Gimana pak
- Informan : Kalo anggota Kud seharusnya kan orang yang masuk dalam organisasi itu dan tercatat sebagai anggota kan bu. La ini dak nelayan semua dianggap anggota. Kan kacau bu keorganisasiannya . Kalo jaman dulu ndak seperti itu. Nelayan jaman dulu masih sedikit, sehingga nelayan terorganisasi secara tertulis, datanya ada. Sekarang coba tanya mana ada, dakmungkin ada.
- Peneliti : Kalo hak dan kewajiban anggota bagaimana pak.
- Informan : Kalo dulu ada, ada simpanan pokok, simpanan wajib ,simpan pinjam untuk nelayan. Mulai tahun 1990an waktu dipimpin oleh H. Hasan sudah dak ada lagi.
- Peneliti : Saya denger kepengurusan KUD jangkar itu secara turun temurun ya pak
- Informan : Iya mulai H. Hasan trus diganti saudaranya, lalu ponakannya H. Agus itu.
- Peneliti : Mekanisme pemilihan ketua KUD seperti apa pak
- Informan : Pemilihan
- Peneliti : Siapa saja yang diundang biasanya
- Informan : Nelayan tapi yang sekarang ini sudah tidak ada pemilihan lagi. Waktu kepemimpinan H. Agus pertamakli melalui pemilihan setelah itu lama dak ada RAT dak pernah ada pemilihan lagi.
- Peneliti : Kalo jumlah kapal di nelayan kira kira ada berapa pak

- Informan : Sekitar 400an.
- Peneliti : Dari semua nelayan yang ada apa menimbang di TPI semua pak
- Informan : Kalo dulu ya bu, malah dilelang masih jaman bapak saya, pake spiker keras. Semua pedagang ngumpul di pelelangan. Trus setelah jamannya H. Hasan sudah dak ada lagi. Namanya pedagang bu, ya ada unsur jiwa pedagang gimanalah bu. Jaman dulu keuangan jelas jadi berapa persen untuk retribusi sisanya untuk KUD. Dan itu dipake untuk simpan pinjam nelayan. Kalo sekarang kan dak ada ya jadi nelayan pinnjamnya ke pangambak padahalkan itu nanti ada perjanjian diambil untungnya untuk pangambak 2000 perkg. Kasihan sama nelayan yang ikut , mereka dak tau utangnya tapi penghasilannya terpotong juga.
- Peneliti : Sekarang kira kira ada berapa perahu yang masih menimbang di Kud?
- Informan : Hanya gardan saja bu, sekitar 20 perahu saja
- Peneliti : Sisanya kemana pak
- Informan : Sekarang di sini banyak pedagang apa itu namanya , istilahnya blantik tu bu sedang menjamur di sini.
- Peneliti : Biasanya blantik itu dijual kemana pak
- Informan : Ke pedagang sepedaan dan sekarang itu banyak travel, biasanya langsung dikirim ke bali, surabaya langsung pake travel.
- Peneliti : Sistem retribusi di TPI jangkar itu seperti apa?
- Informan : Sekarang semasanya nelayan, dak ada aturan yang jelas sekarang lebih banyak uang
- Peneliti : Berapa biasanya pak
- Informan : 3000 kadang 2000. Masalahnya kalo KUD mau narget berapa ya lari semua, la wong uangx dak jelas lari ke kantong sendiri. Banyak yang milih ke pangambek, sama blantik. Di sana kan nimbangkan gratis. Sekarang malah nelayan ambil kontrak ke pangambek .
- Peneliti : Kontrak itu maksudnya bagaimana pak
- Informan : Ya nelayan ambil pinjaman ke pangambek misalnya mereka dak punya mesin pangambek yang biyai bahkan kadang dibelikan perahu, Cuma nanti perkilonya pangambek dapat persenan. Misalnya harga ikan normal 10.000 nanti diambil pangambek 8.000, kan itu merugikan abknya . Seharusnya kalo ada koperasi, koperasi yang memberi pinjaman untuk itu sehingga tidak perlu memotong harga ikan.
- Peneliti : Berarti saat ini kondisi KUD secara administrasi dak jelas ya pak
- Informan : Dak jelas itu bu, dak tau juga pengurus KUD sekarang. RAT saja itu mencuri curi bu, saya paling benci sama yang namanya P. Joko itu. Membodohi masyarakat .
- Peneliti : P. joko siapa ya pak apa hubungannya dengan RAT di KUD
- Informan : Ya p. Joko uptd, dia itukan paling dekat dengan H. Agus. Dia yang mengakali RAT di rumahnya H. Agus. Masak iya RAT di rumah. Ko dak di KUD. Itu otaknya P. Joko. Undangannya

bukan RAT. Undangan saja , setelah datang ternyata RAT. Ya karena waktu itu ijinnya mau dicabut. Kalo undangannya RAT memang itu yang ditunggu-tunggu nelayan kita mau minta pertanggungjawaban masalah retribusi penimbangan masuknya kemana. Belum lagi aset yang lain.

Peneliti : Kalo memang nelayan yang dalam pengakuan KUD itu dianggap sebagai anggota KUD sudah dak puas dan dak percaya kepada Kepengurusan KUD kenapa tidak meminta adanya reformasi.

Informan : Masyarakat jangkar di sini dak ada yang berani bu, apalagi sekarang banyak pengepul-pengepul jadi wes dak mau cari masalah, ya mereka mending lari ke pengepul.

Sebenarnya bu KUD kalo dijalankan dengan benar asetnya itu besar bu, duluitu ada bantuan 25 jt katanya digunakan untuk beli pikep, kalo ditanyakan hasilnya picku katanya dipake untuk tv kabel tapi sampe sekarang mana dak ada wujudnya untuk masyarakat, belum lagi ada sepeda roda 3 untuk mempermudah pengangkutan ikan dari perahu ke TPI dari dinas itu disewakan ternyata ke suplier –suplier. Tapi uang sewanya masuk ke kantong sendiri. Mungkin dibanding dengan daerah lain aset di jangkar itu paling besar.

Peneliti : Bagaimana dengan nelayan dari luar seperti raas sama madura yang mendarikan ikannya di jangkar. Apa mereka mendaratkan ikan di TPI atau langsung ke pengepul.

Informan : Sebagian ada yang ke TPI. Tapi lebih banyak ke pangambek langsung seperti betta itu memang ambakannya biasanya dari luar pulau. Biasanya sistemnya kontrak. Jadi nelayan dari luar sudah ambil uang duluan ke pangambek lah ambil kontraknya itu dak cuma dengan satu pangambek, kadang lebih dari satu. Ya akhirnya kalo ikannya datang rebutan. Itu pernah terjadi, ya akhirnya ikannya dibagi. Kecolongan pangambeknya. Jadi sekarang pangambek yang sering ketipu sama nelayan. Tapi itu biasanya nelayan jauh, dan nelayan besar. Kalo nelayan sini jarang yang seperti itu.

Peneliti : Pada saat sampean ada di KUD administrasinya bagaiman pak

Informan : Ada bu, mau tidak mau kita buat, soalnya itu diminta saat RAT bahkan dak Cuma setahun sekali ada pertemuan bulanan, triwulan sekali, dan jika ada masalah biasanya kita mengadakan rapat insidental. Sekaranng janngankan catatan, la wong catatannya biasanya Cuma pake bungkus rokok.

Peneliti : Ya sudah trimakasih atas informasinya pak, nanti kalo ada apa apa saya akan minta informasinya lagi pak

Informan : Iya kalo butuh data saya insyaallah tau masalah nelayan bu.

2. Informan : Bapak Al, Nelayan Gardan

- Informan : Lama dak ke sini bu
- Peneliti : Iya pak, masih agak sibuk. Ini pak mau nanya masalah perpanjangan siup untuk gardan kemaren kan katanya bpk mau perpanjang gimana pak, apa ada kendala ?
- Informan : Ndak ada bu, alhamdulillah punya anak-anak sudah selesai bu, Cuma terus terang punya saya yang belum soalnya baru beli prahu yang baru.
- Peneliti : Tapi gimana pak dak ada kendala, soalnya kemarenkan ada uu yang melarang tentang operasional gardan
- Informan : Dak papa ko bu, buktinya punya anak-anak sudah jadi SIUPnya.
- Peneliti : Ya sudah kalo begitu pak. Kalo di jangkar ada berapa perahu gardan pak
- Informan : Ya sekitar 25 an dah bu
- Peneliti : Biasanya ikan yang tertangkap jenis ikan apa pak haji
- Informan : Ikan dasar mba, seperti jenggelek sama karese
- Peneliti : Selain gardan biasanya nelayan jangkar memakai alat tangkap apa ya pak haji.
- Informan : Yang banyak tradisional seperti payang sama pancingan
- Peneliti : Biasanya nelayan mendaratkan ikan di mana pak
- Informan : Dak biasanya langsung ke pengepulnya, bagian timur ke TPI ada penimbangnyanya sendiri Begitu juga yang barat sudah ada penimbangnyanya sendiri mba. Dulu hampir semua nelayan nimbang di TPI tapi beberapa tahun terakhir ini sudah dak ada lagi. Hanya nelayan gardan yang mendaratkan ikan di TPI.
- Peneliti : Kenapa pak nelayan gardan ko masih bertahan untuk menimbang di TPI, padahal sekarang banyak penimbang di luar TPI dan disana tidak ada retribusinya
- Informan : Karena mentaati peraturan, Cuma yang mengatur itu salah.
- Peneliti : Apakah bapak termasuk anggota koperasi juga
- Informan : Semua nelayan katanya anggota koperasi tapi secara tertulis saya belum .
- Peneliti : Tapi anggota koperasi secara tertulis ada ya pak
- Informan : Anggotanya sudah dak jelas lagi karena sudah tidak pernah RAT. Itu sisystemnya keluarga cendana itu mba.
- Peneliti : Kalo menurut pak haji bagaimana perkembangan KUD dari tahun mulai berdiri sampai sekarang ?
- Informan : Dak ada perkembangan sama sekali malah dak karuan, KUD itu dakjelas ko. Dulu KUD pernah dapat bantuan dari pemerintah t25 jt tapi dinikmati sama ketua KUD.
- Peneliti : Apakah bapak pernah dilibatkan dalam pemilihan Pengrus KUD
- Informan : Dak pernah, diundang
- Peneliti : Kalo menurut pak haji kenapa banyak perahu yang pindah tidsak nimbang di Kud lagi.
- Informan : Karena KUD nya dak normal

- Peneliti : Maksudnya tidak normal itu gimana pak haji.
Informan : Hasil retribusi dak jelas larinya kemana.
- Peneliti : Pembayaran retribusinya itu carukan atau gimana pak haji
Informan : Pake uang, dulu pake carukan, dak mau saya sekarang pake uang
Peneliti : Berapa pak haji
Informan : 3000/dung. Tapi pendapatan KUD banyak, mana sewa gudang es, pedagang itu seharusnya bayar, bahkan ada bantuan sepeda roda tiga tapi nelayan dak pernah pake. Dak tau kemana malah sekarang sepedanya.
- Peneliti : Apakah ada pinjaman yang diberikan oleh KUD
Informan : Dak ada, La wong uangnya kalo dapat sekarang langsung dibagi bagi habis dak ada lagi.
- Peneliti : Saya dengar dulu semua ikan masuknya ke KUD ?
Informan : Iya jamannya sebelum junaedi sempat ada lelang , Cuma sementara setelah itu KUDnya dak karuan karuan nelayan sudah tahu.
- Peneliti : Kapan mulai marak penimbangan di luar TPI
Informan : Tahun 2010an. Agak nakal nelayan, karena nakalnya itu pengurusnya dak becus. Ikan retribusinya dak jelas.
- Peneliti : Yang jaga di TPI apakah anggota koperasi pak
Informan : Dak ada istilah pengurus, keluarga, semua yg kerja keluarganya H. Agus. La wong saya sering lihat kalo sudah dak ada ikan dapatnya uang langsung dibagi-bagi.
- Peneliti : Apakah bapak pernah diundang untuk pertemuan di KUD,
Informan : Iya sering ada undangan di KUD tapi kegiatannya dinas , saya dak pernah datang, untuk apa ya Cuma itu itu saja dak ada perkembanagn untuk nelayan. Biasanya yang datang ya Cuma untuk uang saku mulai dari 10.000, 25.000, kemaren terakhir kalo dak salah katanya 40.000. saya tapi dak mau datang, malu dan males juga, dak ada hasilnya juga
- Peneliti : Berarti hubungan nelayan dengan KUD sudah tidak baik ya pak
Informan : Sama sekali tidak, nelayan sudah dak percaya lagi pada KUD.
- Peneliti : Kalo pendapatan nelayan gardan kira kira perbulan sampai berapa pak haji
Informan : Dak tentu terganntung musim. Kalo musim ikan bisa sampai 6.000.000. paling sedikit 2.000.000. Kalo gardan soalnya dak ada musim terang bulan jadi ya hampir tiap hari pasti dapat.
- Peneliti : Untuk biaya operasi seklai melaut sampai berapa pak.
Informan : Tergantung kalo kerja disini saja sekitar 600rb kalo keluar pulau seperti selat madura bisa sampai 3 jt, untuk solar,es dan makannnya. Modalnya besar karena biasanya nginep 1 hari 2 malam.
- Peneliti : Kalo bapak menimbang biasanya apa dicatat di buku oleh petugas Tpi
Informan : Dak ada. Masa coba nulisnya saja biasanya di bungkusnya rokok. Masa pantes. Saya pernah minta yang resmi yang ada stempelnya

- dak ada .
- Peneliti : Kalo yang andon apa masuk ke TPI juga
- Informan : Iya sebagian bahkan retribusinya lebih besar 5000 per keranjang
- Peneliti : Banyak pak haji
- Informan : Dak juga tapi kalo musim ikan pasti ada 4 atau kadang 3 pasti ada. Tapi dapatnya banyak kadang 20 keranjang .
- Peneliti : Kalo sudah tidak pernah RAT biasanya ijin usaha koperasinya kan bisa dicabut
- Informan : Biasanya gitu. Saya pernah kirim surat ke koperasi tapi dak ada tanggapan . Saya putus asa wes dak tau lagi, yang penting saya tetep partisipasi nimbangny tetep di TPI. Kalo main jujur jujur paling rusak di jangkar Kalo dak ada penataan secara konkrit dari KUD dak perlu juga jadi anggota untuk apa, la wong dapat apa apa dari KUD, sementara yang jaga di sana keluarganya bukan sisyem anggota tapi keluarga anggota disingkirkan.Keluarganya yang menguasai, kan repot mba.
- Peneliti : Ya sudah pak haji trimakasih banyak, maaf sudah mengganggu
- Informan : Ya dak papa mba

3. Narasumber : P. Bl, Blantik. (Pangambek kecil), DesaJangkar

- Peneliti : Permissi pak, sedang sibuk pak
Informan : Ndak bu,
Peneliti : Ini bapak jualan ikan
Informan : Iya sedikit sedikit bu
Peneliti : Sudah lama jualan ikan pak
Informan : Lama sekitar 17 tahu. Ibu ynag biasanya ngambek saya sama bapak yang jualan
Peneliti : Punya perahu sendiri apa Cuma ngambek saja
Informan : Dak kita Cuma ngambek saja.
Peneliti : Punya berapa ambekan
Informan : Cuma 6 perahu
Peneliti : Biasanya perahu apa
Informan : Payang sama pancing
Peneliti : Dak pernah ambil ikan di TPI
Informan : Ya iya kalo di sini sudah dak ada ikan ya kesana bu, kalo dak nyari apa yang mau dijual bu. Kalo di TPIkan ada gardan jadi hampir setiap hari ada ikan.
Peneliti : Biasanya ikannya dijual ke mana pak.
Informan : Keliling ke desa desa
Peneliti : Dak pernah kirim ke luar daerah atau mungkin dijual ke p. H. Syukron
Informan : Dak, lokalan saja bu, kalo ke pangambek besar kalo dapat ikan eksporan seperti kakap, kerapu baru saya jual ke pangambek.
Peneliti : Untuk ambekannya biasanya sampean ambil jasa pak
Informan : Dak bu, kalo saya mintai bayaran ya lari semua ambakan saya.
Peneliti : Apakah bapak pernah memberi kontrak atau pinjamna kepada nelayan
Informan : Dak bu, saya dak ada modal. Biasanya itu kalo pangambek besar seperti h. Tapa. H.syukron bahkan kadang dibelikan mesin atau perahu.
Peneliti : Biasanya jenis ikan apa pak,
Informan : Yang sering tarebang, kadang laes
Peneliti : Sehari samai berapa banyak pak
Informan : Paling banyak 4 keranjang bu
Peneliti : Nelayan di sini sekitar ada berapa pak
Informan : Banyak ada kalo Cuma 300
Peneliti : Dari 300an nelayan banyak yang masuk ke TPI
Informan : Jarang bu, kebanyakan gardan. Dari petugas KUD nya kurang ketat, kalo di mimbo semua harus masuk ke TPI dak boleh ke gudang. Kalo di sini dak. Mana dekat ditimpbang. Ketua KUD pengaturan KUD kurang ketat
Peneliti : Kalo jaman dulu memang seperti ini atau gimana pak
Peneliti : Mulai tahun berapa pak TPI mulai sepi
Informan : Sekitar tahun 1990an.

- Peneliti : Kalo ketua KUD sudah berapa lama jadi kUD pak
Informan : Sudah lama mungkin sudah 3 periode
Peneliti : Kalo cara pengangkatannya melalui apa pak
Informan : Pemilihan
Peneliti : Pernah diundang pak
Informan : Iya pernah
Peneliti : Berarti masyarakat masih percaya kepada ketua yang sekarang pak
Informan : Itu disamakan, kadang anak anak dimintai tada tangan, lama lama baru tahu kalo itu untuk perpanjangan. Jadi diperpanjang sendiri gitu bu.
Peneliti : Apakah pernah diadakan RAT oleh KUD
Informan : Dak ada bu, di sini koperasi sudah dianggap dak ada . petik laut aja di sini dak ada . selama ini petik laut dibiayai pribadi sama H. Mustapa.
Peneliti : Bagaimana kepercayaan nelayan terhadap KUD
Informan : Dak ada sudah bu, nelayan malah bilang dak usah nimbang di TPI
Peneliti : Kenapa pak
Informan : Karena hasil retribusinya dak tau dikemanakan. Yang jaga TPI selak bu, kadang diminta uang kadang carukan tergantung nelayannya.
Peneliti : Ya sudah silahkan dilanjutkan lagimaaf sudah mengganggu

4. Bapak Dn, Umur 31 th, Nelayan, Desa Wonorejo

- Peneliti : Permissi pak, bede juko' pak ?
Informan : Ghik tak osom ibu, neka bhuru ngantang, tak pate benyak
Peneliti : Sejak kapan alako majeng pak?
Informan : Abit pon bu, ghik kule kelas empat pon majeng
Peneliti : Berarti pon ambu asokola ampeyan pak?
Informan : Enggi bu terro negguk pesse dhibik, mon lambek nyari jhukok gempang tak padena mangken, sara Jhuko'na.
Peneliti : Resa'are majeng pak ?
Informan : Enggi bu, monkaenje sobung juko' ghi nompo
Peneliti : Nompo kaemma pak
Informan : Kadang ka Beli, neko kule bhuru deteng dheri mimbe, tapi tak olle jhukok
Peneliti : Biasana osom jhukok molae bulen sanapa pak ?
Informan : Mon ekaenje biasana molae bulen samangken bhuru ngantang bu sampai bulen empak pon sobung, tape samangken aobe bu cuacana , tak maste
Peneliti : Bapak alako paraona dhibik napa norok alako ka oreng ?
Informan : Samangken Alhamdulillah ampon andhik sampan dhibik. Mon lambek kule alako ka oreng
Peneliti : Sampeyan angguy pancing napa ajering pak ?
Informan : Kaule ajering bu
Peneliti : Biasana nangkep jhuko napa pak
Informan : sembarang bu, tapi seringnga ngening cakalang
Peneliti : Paraona okoran sanapa pak?
Informan : Tak oneng kaule mon okoranna, bedhe mon perak 11 meter
Peneliti : essesanapaoreng?
Informan : Biasana oreng ka petto otobe ka bellu bu
Peneliti : Mon ngenneng jhuko' biasana ejuel ka pasera pak?
Informan : ka pangambek bu, biasanya saya jual k p. Jalal
Peneliti : sekali melaut biaya solar sama makan sampe berapa ?
Informan : 300-400 bu kalo nompo lebih banyak
Peneliti : Di Pandean sendiri ada berempa pangambek pak
Informan : Benyyak bu bede mon 10 oreng
Peneliti : Kenapa sampean milih e juel ke p.jalal? kenapa dak ke koperasisaja
Informan : Apa bu, koperasi e kaenje tak jalan bu. Neka perak retribusi, Pengurusa tak jelas. Kalo P. Jalal nyaman ka kule bu. Mon butho peshe napak e beri. Biasana kanggui modal mele solar.
Peneliti : Berarti sampean nembang langsung ka p. Jalal ghi?
Informan : Buntan bu, Mon nembang kule paghun ka TPI. Mon ngening jhuko dari kapal pon nelpon ka p. Jalal bu. Di TPI perak nimbang se melle pakun pangambek bu
Peneliti : Koperasi sobung mondhut jhuko ka nelayan pak
Informan : Buntan bu, ghi oreng koperasi se nembang juko' na bu, deki

sakranjang ekalak sa caruk u ongkos nimbang. Nanti olehna dibuat petugas yang nimbang dan masuk koperasi bu. Kadang petugas roce. Mon ngalak ampuh monjung bu, kema banyyakse menta. Tape berema pole

- Peneliti : Kalo regena mudhe koperasi abantu ka nelayan pak?
Informan : Dak ada bu, rege apa kata pangambek mon 2000 ya pakun sobung napa dari petugas koperasi
- Peneliti : Melle sampan napa pessen aotang napa pesse dhibik pak ?
Informan : Sabagien pessen dhibik ben sabagien pesse ollena nginjem
- Peneliti : Geneka nginjem pesse kaemma pak? Napa ka bank atau ka kud?
Informan : Sobung bu koperasina sobung enjeman napa bu, ka bank kaule tak andhik jaminan bu, bank tak poron jaminanna sampan. Biasana kaule nginjem ka pangambe'
- Peneliti : Mon nginjem ka pangambek sistem kadhina pak ?
Informan : Ghi motong ollena jhuko' bu.
- Peneliti : Bapak bisa bahasa indonesia ?
Informan : Sedikit- sedikit bu
- Peneliti : Harganya gimana antara yang punya pinjaman dan ndak punya pinjaman pak ?
Informan : Ya beda bu, biasanya beda dua ribu, sampai pinjamannya habis baru nanti harganya sama.
- Peneliti : Berapa rata-rata hasil tangkapan perharinya pak?
Informan : Ya ndak tentu tergantung kalau lagi untung se hari bisa 4 jt, kalau lagi apes kayak hari ini saya ndak dapat apa-apa bu.
- Peneliti : Itu pembagiannya antara yang punya kapal dengan anak buahnya itu bagaimana ?
Informan : Ya dibagi dua , separoh untuk yang punya kapal, separoh lagi untuk yang lainnya
- Peneliti : Ndak mencoba usaha yang lain ?
Informan : ndakbu
- Peneliti : kenapa?
Informan : Ena'an majeng bu, mon di hitung-hitung koli cuman 1.500.000,-/ bulan. Kalau majeng mon dile kare ngening 1 hari sama dengan kerja 1 bulan
- Peneliti : Kalau musin pacekli' gmana caranya memberi nafkah kepada keluarga ?
Informan : Biasana kaule nginjem ka p.jalal
- Peneliti : disini anggota kud ada berapa orang pak ?
Informan : Semua nelayan cakna anggota KUD bu
- Peneliti : Begh ma cakna pak
Informan : iya bu, cakna anggota koperasi tapi koperasina sobung napana bu
- Peneliti : Apa ada iuran yang harus dibayar pak
Informan : dak ada bu. Kalo anggota KUD tandingan ada bu, Mon masuk kodu bayar Rp 100.000
- Peneliti : Memang ada KUD lainnnya taa pak
Informan : iya ada bu kelompok nelayan. Tapi mulai bede kelompok tak

nyaman bu. Dak ada petik laut lagi kayak dulu. Kalo ada petik laut enak bu biasanya ada hiburan rus terusan sampe saminggu bu. Samangken sepi

- Peneliti : Apa hubungannya petik laut sama kelomok barunya pak
Informan : Ya lambek se biayai petik laut kan KUD, tapi mulai ada kelompok Dak ada dananya bu
- Peneliti : Ko bisa pak, kan ada carukan yang disetor ke KUD
Informan : Iya berubah bu, mulai ada kelompok baru sistemnya bukan carukan tapi bayar 10.000/keranjang. Mau dapat berapa kalo gitu bu, paling cukup untuk bayar yang nimbang. Belum lagi bayar retribusi ke dinas. Kalo TPI nya masih sistem carukan ya nelayan banyak yang pindah ke kelompok
- Peneliti : Sapa yang mendirikan kelompok pak
Informan : Kumpulan pangambek bu
- Peneliti : Biasanya siapa yang jual ikan ke sana
Informan : Biasanya nelayan andon bu, Mon nelayan sini ke TPI semua
Peneliti : Sampean dak pengen jadi annggota kelompok yang baru mungkin ada simpan pinjamnya
Informan : Ndak dah bu, enak minjam di P. Jalal. Paling juga nanti yang enak orang yang diatas bu. Kalo kayak kita ya tetep aja dak dapat apa-apa
- Peneliti : Kalo dari KUD apa tidak pernah ada kegiatan atau bantuan untuk nelayan pak
Informan : Banyak Bu mulai dipimpin Pak Marham, pinggir pantai di beri plengsengan dan kalo ada keperluan apa apa biasanya kita dipinjami truk
- Peneliti : apa itu truknya Pak Marham ?
Informan : Bukan bu truknya Kud
Peneliti : Kalo memakai truk ada biayanya pak
Informan : Dak ada bu Biasnya cukup supirnya rokok dan makannya.
Peneliti : Apa Bapak kenal dengan pengurus KUD
Informan : Ya kenal lah bu
Peneliti : Waktu pemilihan pengurus KUD apa bapak diundang ?
Informan : Iya bu diundang semua, nelayan, pangambek. Mon se laki majeng biasanya bini na se dateng . Tapi se becik tekana diundanng ampoh tak dateng
- Peneliti : Apa sampean pernah diundang rapat anggota KUD?
Informan : Ya bu tiap tahun pasti diundang kakabeh bu
Peneliti : Apa bapak ikut kelompok nelayan
Informan : Buntan bu, Kemaren ada kelompok tapi saya tak norok

5. Bapak Mk, Umur 45 th, Nelayan

- Peneliti : Nah kalo bapak gimana ni pak apa bapak juga melaut
Informan : Iya bu, tapi saya mancing pake perahu kecil di pinggirin saja
Peneliti : Apa ikannya juga di jual ke TPI
Informan : Ndak bu, cuman dimakan sendiri sama dipanggang sama istri saya
Peneliti : Kalo menurut Bapak ni pak gimana pendapatnya tentang KUD di pandean ini
Informan : Waduh kalo KUD itu di sini Cuma namanya KUD mba, aktifitasnya ya cuma penimbangan saja sama ngurusi retribusi saja. Kalo dulu sistemnya pake sistem carukan. Tapi mulai tahun kemaren karena ada KUD tandingan ya ikut pake uang per keranjang 10.000
Peneliti : Biasanya uangnya hasil carukan itu gimana pak pemnafaatannya
Informan : Sebagian dipake untuk retribusi, sisanya kita dak tau kemana
Peneliti : Katanya untuk petik laut pak
Informan : Petik laut itu nyaruk lain pak, jadi ada 2 caruk. Yang satu untuk retribusi yang satu kusus untuk petik laut, Cuman setahun ini dak ada lagi petik laut
Peneliti : Kalo menurut bapak gimana pendapatnya tentang KUD tandinngan atau kelompok yang baru dibentuk itu pak . Kenapa kok bisa ada KUD baru
Informan : Kalo dak salah dulu sebenarnya mungkin karena cemburu karena kalo dihitunng dapatnya carukan dikurangi retribusi itu hasilnya banyak. Selain itu juga karena kasihan kepada nelayan kadang carukannya terlalu munjung itu bu. Jadi mereka bikin penimbangan sendiri. Tapi sayangnya mereka juga dak mau nanggung retribusi jadi ya retribusi nya ditanggung ileh KUD semua. Tapi ya ujung ujungnya keuntungan orang besar. Yang nelayan tetep aja dak dapat apa-apa
Peneliti : Biasanya yang nimbang ke kompok banyak pak
Informan : Biasanya nelayan andon. Kalo nelayan sini hampir semua nimbang di TPI

6. Bapak Mm, Perwakilan KUD Mina Selat Bali, Desa Wonorejo Kec. Banyuputih

- Peneliti : Assalamu'alaikum Pak, maaf pak ni mengganggu
Informan : Silahkan masuk bu, mari duduk. Ada yang dapat saya bantu bu
Peneliti : Apa benar bapak ketua KUD nelayan di sini
Informan : Iya betul mba
Peneliti : Apa bapak tahu sejarah berdirinya KUD di sini pak
Informan : Awal mulanya P.mahi mendirikan peneneran ikan bandeng. Jadi kelompok itu diatas namakan KUD,tahun 1982, Setelah itu ada nelayan jangkar disana dari daerah lain ke pandean maka dibuat penimbangan ikan. Karena nngumpulnya di sini maka bergabung menjadi satu yaitu peneneran dan penimbangan ikan . Tapi setelah itu kelompok peneneran ikan ndak berjalan jadi cuma ada jasa penimbangan ikan
Peneliti : Kalo Bapak sendiri Sejak kapan menjadi ketua KUD di sini pak
Informan : Saya tahun 2004
Peneliti : jumlah nelayan di pandean ini ada berapa orang Pak
Informan : Kalo nelayan ada sekitar 100 orang
Peneliti : Alat tangkap yang digunakan apa saja
Informan : ada pake gondrong yang hijau, jukung, ada juga gardan
Peneliti : Dari semua yang ada itu berapa orang yang menimbang ke KUD
Informan : Hampir semua ditimbang di KUD , Cuma ada kendala satu tahun kemaren tidakmenimbang
Peneliti : Kenapa,
Informan : Mulai satu tahun yang lalu, ada penimbang yang lain
Peneliti : Berapa banyak nelayan yang menimbang ikan di tempat lain ?
Informan : Kebanyakan nelayan andon. Kalo nelayan setempat tetep nimbang di TPI
Peneliti : Prosedur pemilihan pengurusKUD itu seperti apa pak
Informan : itu melalui pilihan
Peneliti : Berapa tahun sekali dilakukan pergantian pengurus
Informan : 3 tahun seklai. Setelah saya 5 tahun sekali
Peneliti : Aktifitas KUD apa saja pak
Informan : Penimbangan dan simpan pinjam
Peneliti : Dengan siapa saja KUD ini menjalin hubungan baik itu dengan instansi pemerintah, swasta, ataupun organisasi kemasyarakatan di desa ini
Informan : Kalo instansi pemerintah yang pasti dinas koperasi, puskud, dinas kelautan dan dinas perhubungan mba. Kalo dengan organisasi kemasyarakatan ya biasanya dengan kelompok nelayan mengadakan petik laut, arisan dan juga kegiatan sholat nariyah
Peneliti : Biasanya bentuk hubungannya seperti apa?
Informan : Dari dinas perhubungan KUD dapat bantuan berupa truk, dari dinas koperasi berupa pembinaan manajemen

Koperasi. Sebelum kepemimpinan saya KUD Mina Selat bali ini pernah dapat bantuan kapal sebesar 4,3 M. Cuma sampe sekarang saya dak tau keberadaannya. Kalo dari dinas kelautan tahun kemaren dapat bantuan alat tangkap pancing dan jaring, Cuma bantuan itu diatasnamakan kelompok hanya pembinaannya melalui koperasi.

- Peneliti : Kalo dengan swasta apa ada kerjasamanya juga pak
Informan : Belum
- Peneliti : Bagaimana dengan organisasi lain di desa ini
Informan : Iya dengan paguyuban tukang ojek berupa simpan pinjam, jadi biasanya tukang ojek itu meminjam dari koperasi nelayan
- Peneliti : Bagaimana dengan paguyuban nelayan
Informan : Kalo dengan nelayan yng tergabung dengan HSNI erat sekali, bersama dengan nelayan mengawasi keamanan laut
- Peneliti : anggota KUD ada berapa pak
Informan : 100 lebih ya semua nelayan di sini masuk sebagai anggota koperasi
- Peneliti : Kalo pangambek di sini ada berapa orang pak
Informan : Kalo pangambek asli sekitar 10 orang
- Peneliti : Bagaimana hubungan dengan pangambek
Informan : pangambek beli ikannya ke TPI. Jadi nelayan nimbang di TPI kemudian pangambeknya yang beli ikannya. Kalo pangambek kekurangan modal biasanya pinjamnya ya ke koperasi
- Peneliti : Sistem antara KUD dengan nelayan model jasanya seperti apa pak
Informan : Jimpitan atau cawukan, jadi satu keranjang dicawuk, satu cawuk sekitar 1 kg lebih
- Peneliti : Dari pangambek sendiri ke KUD gimana pak apa ada jasa juga
Informan : dak ada Cuma dari nelayan saja
- Peneliti : Bagaimana peran KUD sendiri terhadap anggotanya yang sebagian adalah nelayan
Informan : Kalo sampai saat ini kita dari KUD bisanya membantu nelayan apabila ada keperluan yang membutuhkan transportasi kita memberi pinjaman truk, kalo selain itu masih belum ada
- Peneliti : Apakah KUD membantu masalah permodalan dan pemasaran bagi nelayan
Informan : Kalo modal terus terang saja jarang yang pinjam ke KUD justru pangambek dan tukang ojek yang sering pinjam ke sini
- Peneliti : Tapi padahal memang ada pinjaman untuk nelayan ya pak
Informan : Iya ada. Tapi nelayan biasanya lebih suka pinjam ke pangambeknya
- Peneliti : Kira kira kenapa alasannya pak
Informan : Mungkin karena kalo koperasi angsurannya harus tetap tiap bulan sementara penghasilan nelayan tidak tetap sedang kalo pangambek mereka tidak terikat dengan itu. Mereka bayarnya ya kalo ada ikan dipotong dari penjualannya

- Peneliti : Apakah KUD memiliki AD ART
Informan : Punya
Peneliti : Siapa yang membuat Ad ART
Informan : Yang membuat itu asal usulnya memang ada tapi ada yang direvisi oleh anggota setiap 5 tahun sekali, kalo memang butuh direvisi ya dirubah
- Peneliti : Kegiatan rutin yang dilakukan KUD biasanya apa
Informan : ada musyawarah bulanan
Peneliti : Biasanya dalam kegiatan rutin itu membahas masalah apa saja
Informan : yang dibahas masalah pengeboman, musibah di laut
Peneliti : Berapa tahun sekali diadakan Rapat anggota
Informan : Setahun sekali
Peneliti : Selama kepemimpinan Bapak apa pernah terjadi usulan penggantian pengurus KUD mungkin karena anggota merasa tidak puas
Informan : Pernah, jadi dilakukan rapat luar biasa tapi saya dicalonkan kembali dan sebagian besar masih memilih saya itu sekitar tahun 2005
- Peneliti : Apakah setiap anggota memiliki kewajiban membayar iuran. Berapa Jumlahnya ?
Informan : Ada simpanan pokok 50 rb dan simpanan wajib ya dari hasil carukan itu. Kalo simpanan sukarela tidak ada
- Peneliti : Apakah ada SHU tiap tahunnya
Informan : Tidak ada biasanya hanya bingkisan tiap hari raya
Peneliti : Bagaimana pengelolaan untuk iurannya
Informan : ya untuk simpan pinjam itu, retribusi dan juga petik laut. Petik laut sendiri itu butuh dana besar bu bisa sampai 30 juta lebih . Biasanya kita mendatangkan hiburan gandrung dan kesenian lainnya sampai 7 hari belum lagi upacara larung itu biasanya perahu, kambing, perhiasan dibuang ke tengah laut
- Peneliti : Apa ada syarat tertentu untuk menjadi anggota KUD
Informan : Nelayan yang berdomisili di pandean . Cuma itu bu
Peneliti : Bagaimana peran KUD dalam pengelolaan TPI
Informan : Pengurus TPI ya pengurus KUD mba, Dari hasil jasa penimbnagan biasanya setelah dikurangi untuk juru timbnag dimasukan k KUD. Semua yang mengurus baik kebersihan ataupun jika ada kerusakan alat alat di TPI KUD
- Peneliti : Pengurus TPI apakah sekaligus juga pengurus KUD
Informan : iya
Peneliti : Sebagai ketua KUD apa rencana bapak untuk kemajuan KUD ini
Informan : Kalo dari saya, saya ingin mencoba usaha lain selain jasa timbang, Cuma terkendala oleh tempat pengeringan. Tapi tahun depan plengsengan sudah selesai jadi tempat pengeringan sudah tersedia. Saya ingin nanti nelayan selain menangkap ikan juga bisa melakukan budidaya rumput laut. Nanti hasil dari rumput laut dibeli KUD, Kebetulan saya ada canel perusahaan rumput

lautnya, sehingga nelayan tidak hanya tergantung dari hasil tangkap. Jadi di musim paceklik mereka masih punya penghasilan

Peneliti : Untuk pendanaannya gimana pak, apakah koperasi ada dana untuk modal tersebut

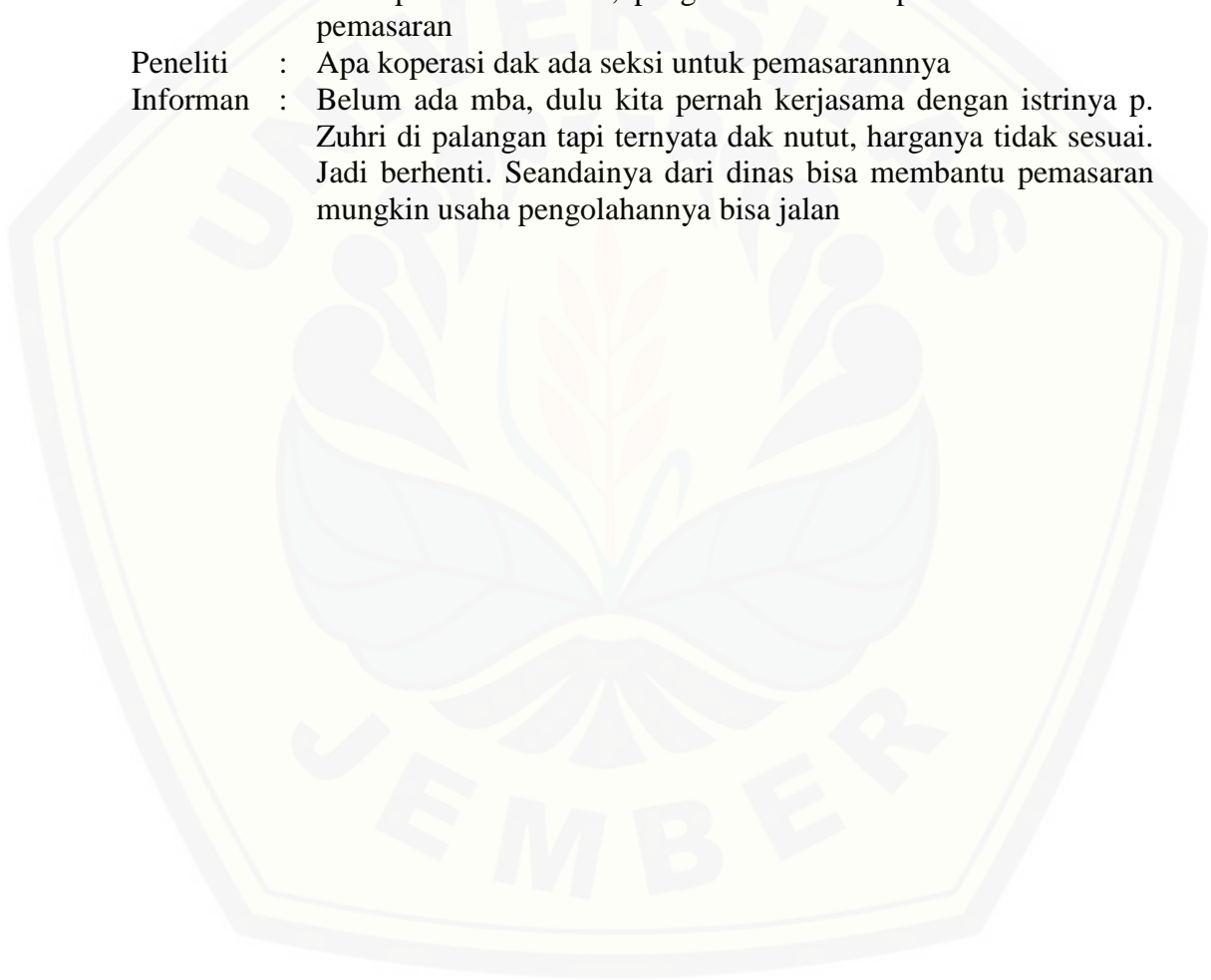
Informan : waduh kalo dipake untuk itu ya habis uangnya koperasi bu, makanya saya berharap nanti ada bantuan dari dinas koperasi ataupun dinas kelautan. Kalo kita dari KUD akan berusaha membuatkan proposalnya saja

Peneliti : bagaimana dengan usaha pengolahan pak, apa koperasi tidak punya usaha pengolahan

Informan : Dulu pernah ada mba, pengolahan abon tapi kita kesulitan di pemasaran

Peneliti : Apa koperasi dak ada seksi untuk pemasarannya

Informan : Belum ada mba, dulu kita pernah kerjasama dengan istrinya p. Zuhri di palangan tapi ternyata dak nutut, harganya tidak sesuai. Jadi berhenti. Seandainya dari dinas bisa membantu pemasaran mungkin usaha pengolahannya bisa jalan



7. Bapak Im, Bapak Sh dan P. Lh, Pengurus Kelompok Cipta Bahari Desa Wonorejo

- Peneliti : Permissi pak. Boleh mengganggu sebentar
Informan : O iya mari bu silahkan. Ada yang bisa dibantu bu
Peneliti : Bapak sudah lama nimbang di sini pak
Informan : Ndak juga bu baru sekitar 3 tahunan
Peneliti : Ini atas nama KUD, pribadi atau kelompok nelayan pak.
Informan : Kami kelompok bu, jadi awalnya kami ada sekitar 6 orang pengambek berinisiatif membuat kelompok nelayan dan melakukan penimbangan ikan.
Peneliti : Tapi di sinikan adaTPI pak dan ada juga KUDnya juga, kok dak nimbang di TPI saja.
Informan : Dulu awalnya saya juga anggota KUD dann nimbang di sana bu, Cuma karena kasihan pada nelayan karena carukannya itu terlalu banyak bu, Dan semua ikan sama, setiap 1 keranjang diambil 1 cadung untuk retribusi. Cadungannya itu besar bu . Pernah itu ambakan saya dapat cumi dicaruk 1 ember setelah ditimbang ada kalo Cuma 3 kilo. Kalo harga cumi 1 kg 35.000 sudah berpa bu. Itu satu keranjang , la kalo satu kapal 5 keranjang dah berapa. Akhirnya kami berinisiatif membuat penimbangan sendiri.
Peneliti : Awal mulanya bagaimana pak kok bpk berinisiatif untuk membentuk kelompok.
Informan : Ya itu tadi mba yang saya sampaikan pertama karena sistem cadungan yang memberatkan nelayan. Yang kedua karena dari KUD sendiri tidak transparan terhadap hasil redistribusi yang diberikan nelayan, berapa jumlahnya, untuk apa pemanfaatannya dan juga, bantuan bantuan yang dak jelas larinya kemana. Dulu KUD dapat bantuan modal dari dinas jumlahnya kurang tahu, tapi dak nyampe ke nelayan, truk juga itu pendapatannya berapa, tapi kita dak pernah tau penghasilannya ke mana, jadi intinya kepercayaan masyarakat nelayan kepada KUD sudah mulai menurun. Ibaratnya KUD sudah dak bisa dibuat cangge untuk nelayan. Akhirnya ya itu kita bikin kelompok sendiri
Peneliti : Tahun berapa bapak mendirikan kelompok nelayan
Informan : 3 tahunan mba jadi sekitar tahun 2013
Peneliti : Apa nama kelompoknya pak
Informan : Apa saya lupa sebentar mba , Cipta bahari
Peneliti : Ooo ada kartu anggotanya juga ya pak
Informan : Ya ada mba.
Peneliti : Bapak di kelompok sebagai apa pak
Informan : Wakil ketua 1
Peneliti : Saya dengar dari nelayan di kelompok bapak ada simpan pinjam ya
Informan : Ada bu
Peneliti : Dananya dari mana pak

- Informan : Di kelompok kami ada istilahnya saham bu, jadi awalnya anggota kelompok menanam saham 50.000. ternyata setelah pembagian SHU dak seberapa. Selain itu juga kita kekurangan uang karena uangnya ada dipinjam terus akhirnya kita tambah menjadi 200.000. Sekarannng alhamdulillah lumayan dah mba
- Peneliti : Kalo dari retribusi apakah masuk ke Kas untuk simpan pinjam juga pak
- Informan : Ndak bu, kalo seperti hasil dari speed bud, kitakan dapat 2 speedbud kita sewakan untuk wisata ke datu, itu kita gunakan untuk kegiatan lain, seperti perbaikan timbangan, dan kitakan juga belum punya tempat yang layak bu, belum lagi kadang kita ikut kegiatan desa seperti karnaval kemaren kita habis 3 jt bu, itu diambil dari sana. Untuk simpan pinjam ya dari sahamnya anggota.
- Peneliti : Biasanya pinjamannya pemanfaatannya untuk apa ya pak
- Informan : Ya macam macam, kadang untuk modal yang mindang, kita anggotanya juga ada pemindang, kalo nelayan biasanya untuk modal ke laut. Masalahnya bu di sini kalo dak musim ikan bunga 15% pun diambil.
- Peneliti : Kalo di kelompok untuk jasa nya berapa pak
- Informan : 2.5 %.
- Peneliti : Kira kira ada berapa perahu yang menimbang di tempat bapak.
- Informan : Kalo yang nelayan sini cuma berapa, 15an. Paling yang ke sini sekitar 8 perahu, kalo sudah musim andon banyak mba, dari muncar, mimbo, besuki, panarukan , kraksan hampir semua masuk ke sini. Lebih kalo dari 50 perahu.
- Peneliti : Kalo pertemuan rutinnya ada bu
- Informan : Ada sebulan 2 kali . tanggal 1 dan tanggal 15. Yang tanggal 15 khusus untuk arisan . Tanggal 1 untuk membahas masal
- Peneliti : O iya maksimal pinjaman berapa dan jangka waktu pengembaliannya.
- Informan : Maksimal 2 jt selama 4 bulan harus lunas. Dan kalo masih ada pinjaman dak boleh minjam lagi
- Peneliti : Kas kelompok sekarang kira kira sampai berapa
- Informan : Ada kalo 30 jtan
- Peneliti : Ya mungkin itu dulu pak. Trimakasih atas informasinya pak
- Informan : Ya bu sama-sama.

8. Bu Kh, Blantik

- Peneliti : Assalamu'alaikum bu, gimana kabarnya
Informan : Alhamdulillah baik bu
Peneliti : Maaf bu malam-malm mengganggu .
Informan : Dak papa bu, maaf tadi saya ada takaza, baru jadi saya suruh ke sininya agak malam
Peneliti : Ini bu, maksud kedatangan saya ke sini selain silaturahmi juga mau nanya nanya sedikit seputar aktifitas ibu sebagai pedagang ikan . Ibu sudah lama dagang ikan bu.
Informan : Ya lama bu, Cuma kalo dulu saya dagang Cuma sedikit, pak kholid yang jual ikannya di daerah sekitar jangkar asebagus kadang ke arjasa bu, Kalo sekarang saya kerjasama sama P. Ace jadi ikannya dikirim ke Bali, probolinggo.
Peneliti : Sistem pembelian ikan ke nelayan gimana
Informan : Ya beli aja. Kalo harga 15 ribu ya saya ambil segitu.
Peneliti : Endak maksud saya apa ada perjanjian kontrak atau bagaimana
Informan : Iya kontrak bu.
Peneliti : Kalo kontarknya gimana bu apakah sampean yang belikan perahu atau pinjaman uang atau seperti apa ?
Informan : Bukan kalo seperti itu namanya pangamba'. Biasanya kalo ada yang mau beli perahu 50 juta itu bagi dua dengan pangamba' . Nanti dari hasil penjualan ikan pangamba' dapat jatah .
Peneliti : Jatah gimana bu
Informan : Ya mereka dapat keuntungan .
Peneliti : Besarnya sampai berapa bu
Informan : Tergantung harga ikan. Kalo di bawah 5.000 biasanya 1000/kg, sampai 15.000 bisa ambil sampai 20.000 ambilnya 2000. Kalo ikan bagus seperti kakap kerapu bisa 3000-5000.
Peneliti : Ooo Berarti tergantung harga ikan ya bu.
Informan : Iya,
Peneliti : Terus itu apa dianggap sebagai cicilan atau bagaimana, pemotongan harga berlaku sampai kapan.
Informan : Bukan, itu penghasilannya pangamba' itu berlaku sampai kapal reusak, kalo ditengah jalan mau berhenti ya harus bayar uangnya.
Peneliti : Kalo seperti sampaian ini seperti apa bu
Informan : Kalo saya orang sini menyebut blantik, biasanya saya ngontrak ke pemilik kapal langsung atau ke pangamba' . Tapi dak banyak palinng 1-2 juta .
Peneliti : Kalo berhenti gimana bu,
Informan : Ya harus kembalikan uang kontraknya.
Peneliti : Kalo dengan pangamba itu bagaimana aturan kontraknya
Informan : Ya mereka menjual hasil tangkapan amba'annya ke saya, mereka Cuma duduk saja, saya yang ngantar uang hasilnya, ada catatannya. Seperti dian itu. Ambakannya itu jualnya ke saya.

- Dia Cuma menerima dari saya. Saya yang motonng. Misal harga ikan 15.000. yang 13.000 saya kasih ke pemilik perahu, 2000nya saya kasih ke dian. Ada catatannya. Kadang dian kalo lagi musim ikan terima dari saya 1000.000. tapi kadang dia sudah pinjam duluan 500.000 gitu bu ya saya potong. Saya kasihkan 500.000.
- Peneliti : Kalo seperti H. Syukronj, H. Naji, H. Latifa, hanif itu gimana bu, diakan juga banyak perahunya sekaligus pedagang juga.
- Informan : Iya itu pangambek raje, ambil untungnya dak kaya pangamba' yang kecil. Bisa sampai 4000/kgnya
- Peneliti : Apa nelayannya dak protes bu.
- Informan : Ya merekakan kadang dak tau harga. Kadang kalo taupun ya dak bisa menolak. Kalo H. Syukron perahunya banyak, biasanya itu perahunya dak usah bagi dua sama pemilik. H. Syukron yang beli semuanya. Tapi banyak yang berhenti . ya soalnya tau ngambilnya terlalu banyak. Daerah sini saja ada 9 oranga berhenti semua.
- Peneliti : Kalo misalnya nelayan butuh uang apa sampean juga kasih pinjaman
- Informan : Ya kalo Cuma sedikit biasanya saya kasih itu pinjaman pribadi jadi kalo dapat ikan banyak langsung saya potong.
- Peneliti : Untuk pembayarannya gimana bu,.
- Informan : Kalo saya langsung cash, saya dak berani kalo hutang bu soalnya kalo hutang takutnya saya mati, nanti nggandoli saya bu. Kalo blantik yang lain banyakan 2 sampai 3 hari baru bayar.
- Peneliti : Biasanya ikannya sampaian kirim ke mana
- Informan : Saya kerjasama sama ace. Jadi ace yang kirim ke Bali, probolinggo. Kalo Ace sudah penuh baru saya jual ke pedagang luar.
- Peneliti : Dak dijual ke pedagang keliling.
- Informan : Iya juga tapi kan Cuma sedikit paling 5 kg sampai 10 kg, saya seharikan bisa 3-5 kw. Kadang bisa sampai 2 ton.
- Peneliti : Kalo ke ace itu biasanya ambil untung berapa?
- Informan : Saya tergantung untungnya ace. Jadi saya dak ngasih harga, saya Cuma bilang belinya berapa. Nanti ace yang jual. Kalo lakunya mahal biasanya saya dikasih keuntungan 1000 kadang Cuma 500 atau 250. Tapi kan sampai 1 tonn kan lumayan bu. Dak papa sedikit yang penting barokah. Kalo sama yang lain benar untungnya gak banyak tapi sering nipu. Tahun kemaren aja uang saya 12.500.000 ada di orang dak dibayar. Makanya saya cari yang aman. Tapi kalo rugi saya dak ikut ikut. Cuma rugi waktu dan tenaga. Dak dapar apa-apa
- Peneliti : Kan bisa aja ace bohong bilang rugi.
- Informan : Ya terserah dia urusannya dengan Allah, Tapi saya percaya selama ini jarang kalo rugi, saya sudah kerja sama dia lama sudah kaya saudara.
- Peneliti : Kalo untuk timbanganya bu, apa nelayan perlu bayar.

- Informan : Ndak. Saya kan sudah dapat untung dari penjualan ikannya. Itu yang sediakan timbangannya ya ace.
- Peneliti : Kalo dak musim ikan sampean dak pernah ke TPI
- Informan : Dak bu, sekarang kalo dak dapat payangan ya biasanya pancingan, mesti ada. Cuma kalo pancingan modalnya besar soalnya harga ikannya mahal.
- Peneliti : Ya sudah dulu bu. Trimakasih informasinya
- Informan : Ya sama-sama



9. Bapak Si dan Bapak Ya, Nelayan

- Peneliti : Pora. Gimana mesinnya pak sudah dapat
Informan 1 : Belum bu, katax bu watik antara tanggal 1-10 ini.
Peneliti : Pak, sampean majeng sudah lama .
Informan 1 : Lama bu mulai ke kene saya la majeng
Peneliti : Sampean biasanya ngasoake cukona ka sera
Informan 1 : Kule ka p. Deki.
Peneliti : Biasanya mon ngasoake ka sa bede perjanjiannya ghi pak
Informan 1 : Ya sayakan kemaren ngajukan bantuan cana kule me oleh pesse pangarana mabalie pesena p. Deki bu, polana mon endi tanggungan regena cuko tak pade bu. Misala se laen regena 10.000 endina kule e kala 8.000 mon cukona rege 15.000 lebih kadang sampe 3.000 potongana. Saungguna kule perak endik tanggungan 5.juta
Peneliti : Itu 2000 dianggap cicilan atau gimana pak.
Informan 1 : Bene bu, nggi otanga kule pakhun.
Peneliti : Sampai kapan potongan genika.
Informan 1 : Sampai obus
Peneliti : Napana se obus pa
Informan 1 : Ya sampana rusak tak kening anggui buru obhus
Peneliti : Misal sampana ki bagus sampean ambuh tak ngasoake cuko berema pak
Informan 1 : Nggi mabali pesena
Peneliti : Mon sampana rusak sampean tetep mabal;i pesse gi pak.
Informan 1 : Buntan bu. Tapi mon nginjema banyak gi biasana mabali misala 10.000.000 mabali 5 juta. Tapi mon P. Deki biasanya tak banayk bu. Paling banyak 10.000.000.Mon H. Syukron je raje Bu, biasanya e meleaki sampan sampe 25 jt bede se 50 jt. Daerah bugeman, pondok langger sampana H. Syukron kabhi. Malah bede se e mature.
Peneliti : Kontraknya sampean biasanya tertulis napa buntan
Informan 1 : Buntan Bu, Mon H. Syukron neka P. Yuyu ambe'ana se mature biasanya bede perjanjiannya.
Peneliti : Iya P. Yuyu gimana kalo di H. Syukron.
Informan 2 : Iya bu,mon perak daerah jangkar buntan tak usah perejanjian, mon Mature biasanya bede perjanjiannya. Polana Bisana je raje bu sampana. Bede se rege 50 jt.
Peneliti : Kalo Sampean masih ada pinjaman nanti sewaktu waktu pinjam pole itu dikasih pak
Informan 1 : Tergantung bu. Bes ngabes. Kalo orangnya Cuma main-main masuknya cuko perak sakuni tak kera e beri. Tapi mon bajeng biasana e beri tapi tak benyak. Tapi mon ngeneng cukona banyak biasanya langsung e potong bu.
Peneliti : Kalo yang H. Syukron gimana pak
Informan 2 : Pade bei bu

- Peneliti : Kalo nelayannya jual ke orang lain gimana bu
Informan 2 : Dak bisa bu itu ketemu, kalo p. Deki itu jalan bu, dia dah nunggu di tase kenengana sampan. Mon H. Syukron perak ju toju tape oenga banyak. Di asta , pondok langger bedede daganga. Deki dagangga oleh 1000 dari H. Syukrok / kg ikannya.
- Peneliti : Biasanya perahu yang ke P. Deki perahu apa pak
Informan 1 : Meber bu, bedede sekeni bedede se raje. Mon enndikna saya perahu kene bu. Kule ta betah alako e tengah. Mon perahu raje tekana pade-pade pancingan banyak olena polana mon alako dari jam 3 keku kadang sampe ka isya ke bedede e tase'
- Peneliti : Mon H syukron berema pak
Informan 2 : Banyak bu, Perahu pancingan, pajengan bedede, se kene se raje banyak bu. Mon H. Syukronkan pangambe rajena.
- Peneliti : Cukona mon P. Deki biasanya e jual ka ema pak
Informan 1 : Kaenjeen. E kala dagang keliling. Mon banyak biasana e juel ka H. Syukron kia . Mon H. Syukron semua ikkan bu, dagang lokal dia ada. Tapi luar kota nggi banyak. Terutama Cuko eksplan padena bubut, karapu, mera'an.
- Peneliti : Sehari biasanya dapat sampai berapa ribu pak.
Informan 1 : Nyamana nelayan takl maste bu, kadang sehari dapat 3 are tak ole apa. Ya mon rejeki bisa oleh pesean 50, 100 kadang 300 rb.
- Peneliti : Solara ngabi berempa pak
Informan 1 : Tak banyak bu paling 15-20 rb
Peneliti : Sabulen mon usum cuko bisa dapat penghasilan berapa pak .
Informan 1 : Tak maste bu,
Peneliti : Napak 1 jt
Informan 1 : Ya mon rejekina bisa lebih bu. Rata-rata sagenikopon bu.
Informan 2 : Mon pancingan raje, pajeng banyak bu lebih mon perak 2jt. Mon pajengan usum cuko mara samangken bisa 2-5 kw.
- Peneliti : Ya sudah pak. Trimakasih bektona pon aganggu
Informan 1 : Buntan bu, Tak punapa

10. Bapak Sl dan Bapak Im, Pengurus Kelompok Cipta Bahari (KUD Tandingan)

- Peneliti : Permissi pak, maaf saya kesini lagi,
Informan 1 : Iya bu ada yang bisa kami bantu
Peneliti : Iya pak, kemaren lupa nanyakan tentang keanggotaan kelompok Bapak ini seperti apa. Apakah ada syarat tertentu untuk masuk menjadi anggota
Informan 2 : Begini bu. Dulu awalnya anggota kelompok kita ada 47 orang, seiring waktu semacam ada seleksi jadi ada yang masuk ada yang keluar, ada juga yang meninggal. Sekarang tinggal 40 orang . Mulai tahun ini kita sepakat kalo ada yang masuk kedalam anggota harus dirapatkan dulu dengan anggota jadi kita adakan rapat dulu, Kita seleksi, apakah ini benar-bener apa Cuma mau merusak kelompok. Jadi yang memutuskan bukan ketua atau pengurus tapi melalui rapat anggota. Tapi sebenarnya siapa saja yang profesinya berhubungan dengan perikanan, baik pedagang, pengolah atau nelayan boleh bergabung dengan kelompok.
Peneliti : Apa setiap anggota diwajibkan menanam saham seperti yang sampean bilang kemaren sebesar 200 rb.
Informan 2 : Ooo ndak bu, Itu terserah anggota, Jadi istilahnya kelompok kita punya koperasi simpan pinjam, yang jadi anggota koperasi itu saja yang menanam saham
Peneliti : Berapa orang yang ikut koperasinya pak .
Informan 1 : Cuma satu orang yang dak ikut bu, kebetulan orannya domisilinya dak di sini. Usahanya saja yang di sini.
Peneliti : Yang meminjam apakah semua anggota koperasi atau anggota kelompok
Informan 1 : Koperasi saja bu
Peneliti : Untuk SHUnya yang dibagikan semua dengan modalnya apa keuntungannya saja pak
Informan 1 : Keuntungannya saja
Peneliti : Apakah anggota bisa meminjam lagi jika tanggungannya dak mencapai 2 jt tapi belum lunas.
Informan 2 : Dak bisa bu, harus dilunasi dulu baru boleh pinjam lagi.
Peneliti : Itu semua tercatat ya pak
Informan 2 : Ya bu, Memang kita masih sangat awam masalah administrasi kelompok, tapi kita punya adminsttrasinya seperti ini bu, ini buku kas, saldo kelompok saat ini ada 8.400.000. ini ada buku arisan, ada juga buku angsuran anggota seperti ini. Buku angsuran besarnya seperti ini tapi masih berantakan belum saya salin.
Peneliti : Anggotannya profesinya apa saja pak
Informan 1 : Macam-macam bu, ada pangamba' sekitar 8 orang, nelayan yang punya perahu sendiri sekitar 7 orang, blantik ada 5 orang

- sisanya ABK , kecuali mas imam ini. Dia guru MTs Dia sekretaris di kelompok ini.
- Peneliti : Kalo sistem penjualan di Kelompok bapak apa langsung transaksi atau gimana pak
- Informan 1 : Lelang bu, biasanya pangamba'nya dengan pedagang dari luar sapa yang nawar lebih tinggi di jual ke orang itu
- Peneliti : Ikannya dak dijual ke luar daerah ya pak
- Informan 1 : Dak bu ada pedagangnya yang ke sini.
- Peneliti : Kalo kelompok sendiri selain dengan pedagang mungkin ada kerjasama dengan pihak luar pak,
- Informan 1 : Apa ya, ya itu dengan wisata datu
- Peneliti : Maksudnya gimana tu pak.
- Informan 2 : Kitakan punya speedbud, kita kerjasama dengan CV yang bergerak di bidang tour dan travel. Jadi speedbudnya dibuat untuk wisatawan yang mau mancing atau ke datu.
- Peneliti : Jadi pembayarannya bukan dari wisatawannya langsung.
- Informan 2 : Dak bu, kita dikasih dari Cvnya, soalnya kan alat untuk snokling, mancing CV yang menyediakan. Kalo dak ada wisatawan dari CV baru kita ke wisatawan pribadi.
- Peneliti : Kas dari speed boad dan penimbangan biasanya untuk apa pak.
- Informan 2 : Untuk perbaikan speedbud, bayar sewa tempat penimbangan.
- Peneliti : Apa tidak dibagikan ke anggota
- Informan 1 : Untuk saat ini belum bu, soalnya kita masih banyak keperluan. Rencana kita mau buat tempat timbangan, inikan masih sewa dan tempatnya juga sudah reot. Jadi rencana untuk tempat timbangan yang lebih layak. Kadang juga dipinjam koperasi jika saldonya habis.
- Peneliti : Aturan dalam kelompok secara tertulis sudah ada pak ya kalo koperasi AD ARTnya
- Informan 2 : Belum bu, kita masih dak paham betul masalah seperti itu, kalo ada pelatihan tentang manajemen kelompok kita sangat berharap dapat ikut biar kelompok kita bisa maju. Rencana kita mau bikin BH untuk kelompok kita Cuma kita dak tau syarat dan caranya bu. Ini masih usaha.
- Peneliti : Iya pak trimakasih atas infonya pak. Saya permisi dulu
- Informan 2 : Iya bu. Sama-sama